

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

4	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
41	Penerimaan Perpajakan
411	Pendapatan Pajak Dalam Negeri
4111	Pendapatan Pajak penghasilan
41111	Pendapatan PPh Migas
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi
	Penerimaan yang berasal dari PPh minyak bumi yang terdiri dari :
	· Setoran PPh Minyak Bumi,
	· Surat Tagihan Pajak (STP),
	· SKPKB PPh Minyak Bumi dan,
	· SKPKBT PPh Minyak Bumi.
411112	Pendapatan PPh Gas Alam
	Kode MAP ini digunakan untuk menampung penerimaan ke kas negara yang berasal PPh gas alam yang terdiri dari :
	· Setoran PPh Gas Alam,
	· Surat Tagihan Pajak (STP),
	· SKPKB PPh Gas Alam dan,
	· SKPKBT PPh Gas Alam.
411113	Pendapatan PPh Lainnya dari Minyak Bumi
	Penerimaan yang berasal dari PPh Lainnya yang dihasilkan dari kegiatan penambangan minyak bumi yang terdiri dari :
	· Setoran PPh Lainnya dari Minyak Bumi,
	· Surat Tagihan Pajak (STP) Lainnya dari Minyak Bumi,
	· SKPKB PPh Lainnya dari Minyak Bumi dan,
	· SKPKBT PPh Lainnya dari Minyak Bumi.
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya
	Penerimaan yang berasal dari PPh Lainnya yang dihasilkan dari kegiatan penambangan Gas Alam, yang terdiri dari :
	· Setoran PPh Lainnya dari Gas Alam,
	· Surat Tagihan Pajak (STP) Lainnya dari Gas Alam,
	· SKPKB PPh Lainnya dari Gas Alam dan,
	· SKPKBT PPh Lainnya dari Gas Alam.
41112	Pendapatan PPh Non-Migas
411121	Pendapatan PPh Pasal 21
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	Masa/Angsuran Tahunan
	· Surat Tagihan Pajak (STP)
	· PPh Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon.
	· Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
	· SKPKB PPh Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon
	· Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan,
	· SKPKBT PPh Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang pesangon
411122	Pendapatan PPh Pasal 22
	Penerimaan dari transaksi dalam negeri yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	· Masa,
	· PPh Penebusan Migas,
	· PPh Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri
	· PPh yang dipungut Bendaharawan,
	· PPh yang dipungut Badan Pemungut Lainnya,
	· Surat Tagihan Pajak (STP),
	· SKPKB,
	· SKPKB PPh Penebusan Migas,
	· SKPKB PPh Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri,
	· SKPKBT,
	· SKPKBT PPh Penebusan Migas dan,
	· SKPKBT PPh Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri,
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

	· Masa,
	· Surat Tagihan Pajak (STP),
	· SKPKB,
	· SKPKBT
411124	Pendapatan PPh Pasal 23
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	· Masa,
	· Dividen,
	· Bunga,
	· Royalti,
	· Jasa,
	· PPh Bunga Simpanan Anggota Koperasi,
	· Surat Tagihan Pajak (STP),
	· STP Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa,
	· SKPKB,
	· SKPKB Dividen, Bunga Royalti dan Jasa,
	· SKPKB PPh Bunga Simpanan Anggota Koperasi,
	· SKPKBT,
	· SKPKBT Dividen, Bunga, Royalti dan Jasa, dan
	· SKPKBT PPh Bunga Simpanan Anggota Koperasi,
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	· Masa/Angsuran,
	· Tahunan,
	· Surat Tagihan Pajak (STP),
	· SKPKB dan,
	· SKPKBT.
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	· Masa/Angsuran,
	· Tahunan,
	· Surat Tagihan Pajak (STP),
	· SKPKB dan,
	· SKPKBT.
411127	Pendapatan PPh Pasal 26
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	· Masa/Angsuran,
	· Dividen,
	· Bunga,
	· Royalti,
	· Jasa,
	· Laba setelah pajak BUT
	· Surat Tagihan Pajak (STP),
	· STP Dividen, Bunga, Royalti, Jasa dan Laba setelah pajak BUT,
	· SKPKB,
	· SKPKB Dividen, Bunga Royalti, Jasa dan Laba setelah pajak BUT,
	· SKPKBT dan,
	· SKPKBT Dividen, Bunga, Royalti, Jasa dan Laba setelah pajak BUT.
411128	Pendapatan PPh Final dan Fiskal Luar Negeri
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	· Fiskal Luar Negeri,
	· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Diskonto/Bunga Obligasi Orang Pribadi
	· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan OP
	· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Orang Pribadi

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

	· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Bunga Deposito/Tabungan dan SBI Orang Pribadi
	· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian Orang Pribadi
	· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Transaksi saham dan obligasi di Burse Efek Orang Pribadi
	· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Pendiri Orang Pribadi
	· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura OP
	· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi Orang Pribadi
	· PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran Dalam Negeri Orang Pribadi
	· PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Orang Pribadi
	· PPh Final Pasal 15 Jasa Penerbangan Dalam Negeri Orang Pribadi
	· PPh Final Pasal 15 Penghasilan Perwakilan Dagang LN Orang Pribadi
	· PPh Final Pasal 15 Pola Bagi Hasil Orang Pribadi
	· PPh Final Pasal 15 Kerjasama Bentuk BOT Orang Pribadi
	· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Diskonto/Bunga Obligasi Badan
	· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Badan
	· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Badan
	· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Bunga Deposito/Tabungan dan SBI Badan
	· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian Badan
	· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Transaksi saham dan obligasi di Burse Efek Badan
	· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Pendiri Badan
	· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura Badan
	· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi Badan
	· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konsultasi Badan
	· PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran Dalam Negeri Badan
	· PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Badan
	· PPh Final Pasal 15 Jasa Penerbangan Dalam Negeri Badan
	· PPh Final Pasal 15 Penghasilan Perwakilan Dagang LN Badan
	· PPh Final Pasal 15 Pola Bagi Hasil Badan
	· PPh Final Pasal 15 Kerjasama Bentuk BOT Badan
	· PPh Final Pasal 19 Revaluasi Aktiva Tetap Badan
	· PPh Final Lainnya
	· Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Final,
	· SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Orang Pribadi,
	· SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Badan,
	· SKPKB PPh Final Pasal 15 Orang Pribadi,
	· SKPKB PPh Final Pasal 15 Badan,
	· SKPKB PPh Final Pasal 19 Badan
	· SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2) Orang Pribadi,
	· SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2) Badan,
	· SKPKBT PPh Final Pasal 15 Orang Pribadi,
	· SKPKBT PPh Final Pasal 15 Badan,
	· SKPKBT PPh Final Pasal 19 Badan
411129	Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya
	Penerimaan yang berasal dari PPh Lainnya yang dihasilkan dari kegiatan penambangan minyak bumi, yang terdiri dari :
	· Setoran PPh Lainnya dari Minyak Bumi,
	· Surat Tagihan Pajak (STP) Lainnya dari Minyak Bumi,
	· SKPKB PPh Lainnya dari Minyak Bumi dan,
	· SKPKBT PPh Lainnya dari Minyak Bumi.
	Penerimaan yang berasal dari PPh Lainnya yang dihasilkan dari kegiatan penambangan Gas Alam, yang terdiri dari :
	· Setoran PPh Lainnya dari Gas Alam,
	· Surat Tagihan Pajak (STP) Lainnya dari Gas Alam,
	· SKPKB PPh Lainnya dari Gas Alam dan,
	· SKPKBT PPh Lainnya dari Gas Alam.
4112	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai
41121	Pendapatan PPN
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	· Setoran Masa,
	· Setoran Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,
	· Setoran Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean,
	· Setoran Kegiatan Membangun Sendiri,
	· Setoran Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan,

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

	· STP,
	· SKPKB Masa,
	· SKPKB Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,
	· SKPKB Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean,
	· SKPKB Kegiatan Membangun Sendiri,
	· SKPKB Pemungut PPN,
	· SKPKBT Masa,
	· SKPKBT Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,
	· SKPKBT Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean,
	· SKPKBT Kegiatan Membangun Sendiri,
	· SKPKBT Pemungut PPN,
	· PPN Final Membangun Sendiri,
	· Pemungut.
411212	Pendapatan PPN Impor
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	· Setoran Masa,
	· STP,
	· SKPKB PPN Impor,
	· SKPKBT PPN Impor,
	· Pemungut.
411219	Pendapatan PPN Lainnya
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PPN dan PPn BM Lainnya yang belum tertampung dalam pembagian jenis penerimaan PPN/PPnBM.
41122	Pendapatan PPnBM
411221	Pendapatan PPnBM dalam Negeri
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	· Setoran Masa/Angsuran,
	· STP,
	· SKPKB Masa,
	· SKPKB Pemungut PPn BM,
	· SKPKBT Masa,
	· SKPKBT Pemungut PPnBM,
	· Pemungut.
411222	Pendapatan PPnBM Impor
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	· Setoran Masa,
	· STP,
	· SKPKB PPn BM Impor,
	· SKPKBT PPn BM Impor,
	· Pemungut.
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PPN dan PPn BM Lainnya yang belum tertampung dalam pembagian jenis penerimaan PPN/PPnBM.
4113	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
41131	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
411311	Pendapatan PBB Pedesaan
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor pedesaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411312	Pendapatan PBB Perkotaan
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor perkotaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411313	Pendapatan PBB Perkebunan

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor perkebunan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411314	Pendapatan PBB Kehutanan
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor kehutanan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411315	Pendapatan PBB Pertambangan
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor pertambangan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411319	Pendapatan PBB Lainnya
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB lainnya yang belum tertampung dalam pembagian jenis penerimaan PBB yang diatas.
4114	Pendapatan BPHTB
41141	Pendapatan BPHTB
411411	Pendapatan BPHTB
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran BPHTB yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 1997 UU No. 20 tahun 2000.
4115	Pendapatan Cukai
41151	Pendapatan Cukai
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau
	Hasil Tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya (pasal 4 ayat (1) c UU No. 11 tahun 1995)
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol
	Ethyl Alkohol atau etanol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C2H5OH yang diperoleh baik secara peragian dan/ atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi dengan tidak mengindahkan bahan yang dig
411513	Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol
	MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman mengandung ethyl alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan antara lain : bir, shandy, anggur, gin, whisky (pasal 4 a
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai
	Penerimaan Denda Administrasi pada Direktorat Bea dan Cukai yang selama ini masih tergabung dalam MAP Pabean Lainnya
411519	Pendapatan Cukai Lainnya
	Pendapatan cukai lainnya adalah Sanksi Administrasi berupa denda (pasal 7 ayat (7) UU No. 11 tahun 1995)
4116	Pendapatan Pajak Lainnya
41161	Pendapatan Pajak Lainnya
411611	Pendapatan Bea Meterai
	Penerimaan yang berasal dari penggunaan Bea Meterai yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 1985.
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai
	Penerimaan dana hasil Penjualan Benda Meterai oleh PT. Pos Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Departemen Keuangan (BA.15).
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran pajak tidak langsung lainnya yang tidak termasuk dalam ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 18 Tahun 2000.
41162	Pendapatan Bunga Penagihan Pajak
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PPh yang diatur berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 19 Tahun 2000.
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

	Penerimaan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PPN & PPnBM dan PTLL yang diatur berdasarkan UU No. 19 Thn 1997 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 19 Thn 2000.
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PPN & PPnBM dan PTLL yang diatur berdasarkan UU No. 19 Thn 1997 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 19 Thn 2000.
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PPN & PPnBM dan PTLL yang diatur berdasarkan UU No. 19 Thn 1997 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 19 Thn 2000.
4119	Pengembalian Pendapatan Pajak dan Cukai
41191	Pengembalian Pendapatan PPh Migas
411911	Pengembalian Pendapatan PPh Minyak Bumi
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPh Minyak Bumi (Mata Anggaran 411111)
411912	Pengembalian Pendapatan PPh Gas Alam
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPh Gas Alam (Mata Anggaran 411112)
411913	Pengembalian Pendapatan PPh Lainnya dari Minyak Bumi
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPh Lainnya dari Minyak Bumi (Mata Anggaran 411113)
411919	Pengembalian Pendapatan PPh Migas Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPh Migas Lainnya (Mata Anggaran 411119)
41192	Pengembalian Pendapatan PPh Non-Migas
411921	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 21
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPh Pasal 21 (Mata Anggaran 411121)
411922	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 22
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPh Pasal 22 (Mata Anggaran 411122)
411923	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 22 Impor
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPh Pasal 22 Impor (Mata Anggaran 411123)
411924	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 23
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPh Pasal 23 (Mata Anggaran 411124)
411925	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi (Mata Anggaran 411125)
411926	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan (Mata Anggaran 411126)
411927	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 26
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPh Pasal 26 (Mata Anggaran 411127)
411928	Pengembalian Pendapatan PPh Final dan Fiskal Luar Negeri
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPh Final dan Fiskal Luar Negeri (Mata Anggaran 411128)
411929	Pengembalian Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya (Mata Anggaran 411129)
41193	Pengembalian Pendapatan PPN
411931	Pengembalian Pendapatan PPN Dalam Negeri
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPN Dalam Negeri (Mata Anggaran 411211)
411932	Pengembalian Pendapatan PPN Impor
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPN Impor (Mata Anggaran 411212)
411933	Pengembalian Pendapatan PPN Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPN Lainnya (Mata Anggaran 411219)
41194	Pengembalian Pendapatan PPnBM

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

411941	Pengembalian Pendapatan PPnBM Dalam Negeri
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPnBM dalam Negeri (Mata Anggaran 411221)
411942	Pengembalian Pendapatan PPnBM Impor
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPnBM Impor (Mata Anggaran 411222)
411943	Pengembalian Pendapatan PPnBM Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PPnBM Lainnya (Mata Anggaran 411229)
41195	Pengembalian Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
411951	Pengembalian Pendapatan PBB Pedesaan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PBB Pedesaan (Mata Anggaran 411311)
411952	Pengembalian Pendapatan PBB Perkotaan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PBB Perkotaan (Mata Anggaran 411312)
411953	Pengembalian Pendapatan PBB Perkebunan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PBB Perkebunan (Mata Anggaran 411313)
411954	Pengembalian Pendapatan PBB Kehutanan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PBB Kehutanan (Mata Anggaran 411314)
411955	Pengembalian Pendapatan PBB Pertambangan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PBB Pertambangan (Mata Anggaran 411315)
411956	Pengembalian Pendapatan PBB Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan PBB Lainnya (Mata Anggaran 411319)
41196	Pengembalian Pendapatan Pajak BPHTB
411961	Pengembalian Pendapatan BPHTB
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan BPHTB (Mata Anggaran 411411)
41197	Pengembalian Pendapatan Cukai
411971	Pengembalian Pendapatan Cukai Hasil Tembakau
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Cukai Hasil Tembakau (Mata Anggaran 411511)
411972	Pengembalian Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol (Mata Anggaran 411512)
411973	Pengembalian Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol (Mata Anggaran 411513)
411974	Pengembalian Pendapatan Denda Administrasi Cukai
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Denda Administrasi Cukai (Mata Anggaran 411514)
411975	Pengembalian Pendapatan Cukai Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Cukai Lainnya (Mata Anggaran 411519)
41198	Pengembalian Pendapatan Pajak Lainnya
411981	Pengembalian Pendapatan Bea Meterai
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Bea Meterai (Mata Anggaran 411611)
411982	Pengembalian Pendapatan dari Penjualan Benda Materai
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan dari Penjualan Benda Materai (Mata Anggaran 411612)
411983	Pengembalian Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya (Mata Anggaran 411619)
41199	Pengembalian Pendapatan Bunga Penagihan Pajak
411991	Pengembalian Pendapatan Bunga Penagihan PPh
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Bunga Penagihan PPh (Mata Anggaran 411621)
411992	Pengembalian Pendapatan Bunga Penagihan PPN
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Bunga Penagihan PPN (Mata Anggaran 411622)

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

411993	Pengembalian Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM (Mata Anggaran 411623)
411994	Pengembalian Pendapatan Bunga Penagihan PTLL
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Bunga Penagihan PTLL (Mata Anggaran 411624)
412	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
4121	Pendapatan Bea Masuk
41211	Pendapatan Bea Masuk
412111	Pendapatan Bea Masuk
	Pendapatan yang berasal dari pungutan bea atas barang-barang impor.
412112	Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)
	Dasar UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabean Pasal 25/26
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean
	Penerimaan Denda Administrasi pada Direktorat Bea dan Cukai yang selama ini masih tergabung dalam MAP Pabean Lainnya
412114	Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
	Pendapatan bea masuk yang harus dipungut atas penjualan lokal dari produk tujuan ekspor yang telah mendapat fasilitas KITE.
412119	Pendapatan Pabean Lainnya
	Pendapatan pabean lainnya adalah :
	Penerimaan yang berasal dari :
	· Sanksi administrasi berupa denda (pasal 37 ayat (1) UU No. 10 tahun 1995)
	· Bunga (pasal 38 ayat (1) UU No. 10 tahun 1995)
4122	Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor
41221	Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor
412211	Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor
	Penerimaan yang berasal dari ekspor beberapa komoditi tertentu yang terkena Pajak/Pungutan ekspor dan penerimaan denda administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak/Pungutan Ekspor
4123	Pengembalian Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
41231	Pengembalian Pendapatan Bea Masuk
412311	Pengembalian Pendapatan Bea Masuk
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Bea Masuk (Mata Anggaran 412111)
412312	Pengembalian Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil) (Mata Anggaran 412112)
412313	Pengembalian Pendapatan Pendapatan Denda Administrasi Pabean
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Denda Administrasi Pabean (Mata Anggaran 412113)
412314	Pengembalian Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) (Mata Anggaran 412114)
412319	Pengembalian Pendapatan Pabean Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Pabean Lainnya (Mata Anggaran 412119)
41232	Pengembalian Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor
412321	Pengembalian Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Pajak/pungutan ekspor (Mata Anggaran 412211)
42	Penerimaan Negara Bukan Pajak
421	Penerimaan Sumber Daya Alam
4211	Pendapatan Minyak bumi
42111	Pendapatan Minyak Bumi
421111	Pendapatan Minyak Bumi

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

	Penerimaan bagian Pemerintah dari penjualan minyak bumi, masuk ke Bagian Anggaran 15.06
421112	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM
4212	Pendapatan Gas Alam
42121	Pendapatan Gas Alam
421211	Pendapatan Gas Alam
	Penerimaan bagian Pemerintah dari penjualan gas alam, masuk ke Bagian Anggaran 15.06
421212	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa
4213	Pendapatan Pertambangan Umum
42131	Pendapatan Pertambangan Umum
421311	Pendapatan Iuran Tetap
	Dipungut dari Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan umum (Kontrak Karya, Kuasa Pertambangan dan Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara). Masuk Bagian Anggaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
421312	Pendapatan Royalti Batubara
	Dipungut dari Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan umum (Kontrak Karya, Kuasa Pertambangan dan Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara). Masuk Bagian Anggaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (BA. 20)
4214	Pendapatan Kehutanan
42141	Pendapatan Dana Reboisasi
421411	Pendapatan Dana Reboisasi
	Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Ijin Penebangan Kayu (IPK) dan Pemenang Lelang Kayu Sitaan. Masuk Bagian Anggaran Departemen Kehutanan (BA 29).
42142	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
	Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Ijin Penebangan Kayu (IPK) dan Pemenang Lelang Kayu Sitaan. Masuk Bagian Anggaran Departemen Kehutanan (BA 29).
42143	Pendapatan IIUPH (IHPH)
421431	Pendapatan IIUPH(IHPH) Tanaman Industri
	Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang izin usaha pengelolaan hutan (IUPH/HPH). Masuk Bagian Anggaran Departemen Kehutanan (BA 29).
421432	Pendapatan IIUPH(IHPH) Bambu
	Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang izin usaha pengelolaan hutan (IUPH/HPH) Masuk Bagian Anggaran Departemen Kehutanan (BA 29).
421433	Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Rotan
	Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang izin usaha pengelolaan hutan (IUPH/HPH). Masuk Bagian Anggaran Departemen Kehutanan (BA 29).
421434	Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam
	Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang izin usaha pengelolaan hutan (IUPH/HPH). Masuk Bagian Anggaran Departemen Kehutanan (BA 29).
42144	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan
421441	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan
	Pendapatan yang diterima dari Dana Pengamanan Hutan (DPH) , Dana Illegal Logging , Dana Kompensasi Areal Pengganti
42145	Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi
421451	Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan
	Pendapatan yang diterima dari Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH), Penerimaan dari Denda post audit dan tata usaha Provisi Sumber Daya Hutan
42146	Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konsevasi Alam
421461	Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup atau Mati (IASL/TA)

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

	Pendapatan yang diterima dari iuran kepada pemegang izin menangkap, mengambil dan mengangkut satwa liar dan tumbuhan alam dalam keadaan hidup atau mati atau bagian-bagian daripadanya yang tidak dilindungi undang-undang dan yang dilindungi undang-undang.
421462	Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA)
	Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA) adalah pungutan yang dikenakan kepada calon pemegang izin pengusahaan pariwisata alam dan dikenakan sekali selama jangka waktu pengusahaan
421463	Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB)
	Pungutan izin pengusahaan taman buru (PIPTB) adalah pungutan yang dikenakan kepada calon pemegang izin pengusahaan taman buru dan dikenakan sekali dalam jangka waktu pengusahaan
421464	Pungutan Izin Berburu di taman buru dan areal buru (PIB)
	Pungutan Izin Berburu adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin berburu dan dikenakan satu kali pada saat izin berburu dikeluarkan
421465	Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam
	Pungutan masuk adalah pungutan yang dikenakan terhdap setiap pengunjung yang masuk ke Taman wisata alam, Taman Nasional dan atau taman Buru
421466	Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA)
	uran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata alam (IHUPA) adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang izin pengusahaan pariwisata alam yang dikenakan dari hasil usahanya sekali setiap tahun
421467	Iuran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPA)
	Iuran Hasil usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPA) adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang izin berburu berdasarkan jumlah satwa yang diburu sesuai dengan harga patokan yang berlaku untuk masing-masing jenis satwa yang diburu.
4215	Pendapatan Perikanan
42151	Pendapatan Perikanan
421511	Pendapatan Perikanan
	Penerimaan dari Pungutan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan dari Perusahaan Perikanan dalam rangka PMA/PMDN. Masuk Bagian Anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan. (BA.32)
421512	Pendapatan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan
	Penerimaan dana kompensasi pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) Kelautan yang berasal dari Kapal Keruk Pasir Laut. Masuk Bagian Anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan (BA.32).
4216	Pengembalian Pendapatan Penerimaan Sumber Daya Alam
42161	Pengembalian Pendapatan Minyak Bumi
421611	Pengembalian Pendapatan Minyak Bumi
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Minyak Bumi (Mata Anggaran 421111)
421612	Pengembalian Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM (Mata Anggaran 421112)
42162	Pengembalian Pendapatan Gas Alam
421621	Pengembalian Pendapatan Gas Alam
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Gas Alam (Mata Anggaran 421211)
421622	Pengembalian Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa (Mata Anggaran 421212)
42163	Pengembalian Pendapatan Pertambangan
421631	Pengembalian Pendapatan Iuran Tetap
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Iuran Tetap (Mata Anggaran 421311)
421632	Pengembalian Pendapatan Royalti Batubara
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Royalti Batubara (Mata Anggaran 421312)
42164	Pengembalian Pendapatan Kehutanan
421641	Pengembalian Pendapatan Dana Reboisasi

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Dana Reboisasi (Mata Anggaran 421411)
421642	Pengembalian Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan (Mata Anggaran 421421)
421643	Pengembalian Pendapatan IIUPH(IHPH) Tanaman Industri
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan IHPH Tanaman Industri (Mata Anggaran 421431)
421644	Pengembalian Pendapatan IIUPH(IHPH) Bambu
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan IHPH Bambu (Mata Anggaran 421432)
421645	Pengembalian Pendapatan IIUPH(IHPH) Tanaman Rotan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan IHPH Tanaman Rotan (Mata Anggaran 421433)
421646	Pengembalian Pendapatan Dana Pengamanan Hutan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Dana Pengamanan Hutan (Mata Anggaran 421441)
421647	Pengembalian Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (Mata Anggaran 421451)
421648	Pengembalian Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam (Mata Anggaran 421434)
42165	Pengembalian Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Satwa Liar dan Perikanan
421651	Pengembalian Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup atau Mati (IASL/TA)
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup atau Mati (IASL/TA) (421461)
421652	Pengembalian Pendapatan Perikanan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Perikanan (Mata Anggaran 421511)
421653	Pengembalian Pendapatan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan (Mata Anggaran 421512)
421654	Pengembalian Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA)
	Merupakan kontra pos dari Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA) (Mata Anggaran 421462)
421655	Pengembalian Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB)
	Merupakan kontra pos dari Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB) (Mata Anggaran 421463)
421656	Pengembalian Pungutan Izin Berburu di taman buru dan areal buru (PIB)
	Merupakan kontra pos dari Pungutan Izin Berburu di taman buru dan areal buru (PIB) (Mata Anggaran 421464)
421657	Pengembalian Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam
	Merupakan kontra pos dari Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam (Mata Anggaran 421465)
421658	Pengembalian Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata alam (IHUPA)
	Merupakan kontra pos dari Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA) (Mata Anggaran 421466)
421659	Pengembalian Iuran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPA)
	Merupakan kontra pos dari Iuran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPA) (Mata Anggaran 421467)
422	Pendapatan Bagian Laba BUMN
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
	Penerimaan dari laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan Negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada suatu BUMN.
42211	Pendapatan Laba BUMN Perbankan
422111	Pendapatan Laba BUMN Perbankan
	Penerimaan bagian pemerintah dari laba BUMN perbankan. Masuk Bagian Anggaran Departemen Keuangan (BA.15.06).
42212	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan
422121	Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

	Penerimaan bagian pemerintah dari laba BUMN non perbankan. Masuk Bagian Anggaran Departemen Keuangan (BA.15.06).
4222	Pengembalian Pendapatan atas Laba BUMN
42221	Pengembalian Pendapatan Laba BUMN Perbankan
422211	Pengembalian Pendapatan Laba BUMN Perbankan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Laba BUMN Perbankan (Mata Anggaran 422111)
42222	Pengembalian Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan
422221	Pengembalian Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan (Mata Anggaran 422121)
423	Pendapatan PNBP Lainnya
4231	Pendapatan Penjualan, Sewa, dan Jasa
42311	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan
423111	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan
	Penerimaan dari penjualan sisa penelitian pertanian, benih dan hasil pertanian dari praktek perkebunan siswa. Masuk Bagian Anggaran Departemen Pertanian (BA.18)
423112	Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan
	Penerimaan dari penjualan sisa penelitian peternakan dan perikanan, semen beku untuk inseminasi buatan, bibit ternak, calon bibit, ternak susu, ternak afkir, hasil peternakan dan perikanan praktek siswa. Masuk Bagian Anggaran Departemen Pertanian (BA.18)
423113	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang
	Penerimaan dari penjualan produksi batubara bagian pemerintah di luar royalti dan PPN. Masuk Bagian Anggaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (BA.20)
423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan
	Penerimaan dari penjualan hasil sitaan baik berupa uang maupun hasil penjualan barang rampasan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan Agung (BA.06).
423115	Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya
	Penjualan vaksin dan antigen hewan ternak pada Departemen Pertanian (BA 18). Penjualan radioisotop pada BATAN (BA 42.03)
423116	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya
	Penjualan Informasi, Penerbitan, Film dan Hasil Cetakan lain yang berada di berbagai departemen seperti Departemen Pertanian (BA 18), Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 20), Departemen Perhubungan (BA 22), Departemen Kesehatan (BA 24), Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (BA.33), Mennegristik (BA.42), Mennegr PAN (BA.54), dan BIKN (BA.59)
423117	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan
	Penerimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen yang berasal dari penjualan dokumen lelang.
423118	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni.
	Penerimaan yang berasal dari penjualan Cadangan Beras pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni oleh Perum BULOG
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya
	Penjualan yang tidak termasuk penjualan-penjualan di atas.
42312	Pendapatan Penjualan Aset
423121	Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah
	Penerimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen tidak termasuk penjualan sewa beli rumah dinas.
423122	Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen
423123	Pendapatan Penjualan Sewa Beli
	Penerimaan dari penjualan rumah dinas melalui kontrak sewa beli. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum
423124	Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing
	Penerimaan yang berasal dari Penjualan Aset Bekas Milik Asing

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

423129	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan
	Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen
42313	Pendapatan Sewa
423131	Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri
	Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen
423132	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang
	Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen
423133	Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak
	Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen
423139	Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya
	Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen
42314	Pendapatan Jasa I
423141	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya
	Pendapatan dari hasil pelayanan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan, baik yang berada di Lingkungan Departemen Kesehatan maupun departemen lainnya.
423142	Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA)
	Pendapatan dari penjualan karcis masuk tempat hiburan/taman maupun museum yang berada di lingkungan Departemen Kehutanan (BA 29) maupun Departemen Pendidikan Nasional (BA 23) dan LIPI/Mennegristek (BA.42)
423143	Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB
	Pendapatan dari pelayanan pembuatan surat Visa dan paspor oleh Departemen Luar Negeri, pembuatan SIM, STNK dan BPKB oleh POLRI, pendapatan dari surat keterangan keimigrasian antara lain KITAS, izin tinggal tetap di Indonesia dari Departemen Hukum dan HAM (BA.13)
423144	Pendapatan Hak dan Perijinan
	Pendapatan dari permintaan hak paten, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Departemen Hukum dan Perundang-undangan (BA 13), Pendapatan dari pendaftaran pestisida, royalti hasil penelitian dan pembuatan label obat-obatan pertanian/peternakan di Departemen Pertanian (BA 18), wajib daftar perusahaan, pengujian mutu barang dan sertifikasi mutu barang di Departemen Perindustrian dan/atau Perdagangan (BA 19), biaya hak penggunaan frekuensi radio, biaya ijin amatir radio di Dep Perhubungan, hak dan perijinan Departemen Tenaga Kerja (BA.26), hak dan perijinan di BPN (BA.56)
	Termasuk Hasil lelang 3G (postel)
423145	Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan
	Pendapatan Sensor/Karantina, pengawasan, pemeriksaan di berbagai departemen seperti Departemen Pertanian (BA 18), Departemen Perindustrian dan perdagangan (BA 19), Departemen Pendidikan Nasional (BA 23), Departemen Kesehatan (BA 24)
423146	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC
	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi di seluruh departemen. Pendapatan BPN (pelayanan pendaftaran tanah yang meliputi : pengukuran dan pemetaan tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribusi tanah, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan informasi pertanahan), jasa pekerjaan yang berasal dari cukai dan kepabeanan.
423147	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama
	Pendapatan dari hasil pelayanan jasa urusan agama terutama pencatatan nikah dan rujuk di lingkungan Departemen Agama
423148	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan, dan Kenavigasian
	Penerimaan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)
423149	Pendapatan Jasa I Lainnya
	Pendapatan jasa yang tidak termasuk pada kelompok jasa I.
42315	Pendapatan Jasa II
423151	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
	Pendapatan yang berasal dari bunga rekening giro pemerintah

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

423152	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi
	Penerimaan dari pungutan operator telekomunikasi yang memperoleh ijin resmi telekomunikasi dan penerimaan jasa telekomunikasi pelabuhan. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)
423153	Pendapatan Iuran Lelang untuk Fakir Miskin
	Pendapatan yang berasal dari sebagian hasil lelang penghapusan BMN yang dialokasikan untuk Fakir Miskin dan berasal dari seluruh Kementerian Negara/Lembaga serta disetorkan atas nama Kementerian Sosial (BA 27).
423154	Pendapatan Jasa Catatan Sipil
	Penerimaan dari hasil pelayanan jasa Kantor Catatan Sipil.Masuk Pendapatan Departemen Dalam Negeri
423155	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa
	Pendapatan yang berasal dari pengenaan biaya penagihan secara paksa atas piutang pajak tidak tertagih. Masuk Departemen Keuangan (BA 15)
423156	Pendapatan Uang Pewarganegaraan
	Pendapatan yang berasal dari uang registrasi menjadi warga Negara Indonesia, masuk Departemen Hukum dan HAM (BA 13).
423157	Pendapatan Bea Lelang
	Pendapatan yang diperoleh dari bea lelang dan masuk ke Departemen Keuangan (BA 15).
423158	Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara
	Pendapatan yang berasal dari Jasa Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. Masuk Departemen Keuangan (BA 15)
423159	Pendapatan Jasa II Lainnya
	Pendapatan jasa yang tidak termasuk pada kelompok jasa II.
42316	Pendapatan Bukan Pajak dari Luar Negeri
423161	Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI
	Pendapatan dari surat perjalanan RI dan masuk ke Bagian Anggaran Departemen Luar Negeri (BA 11)
423162	Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler
	Pendapatan dari pengurusan dokumen konsuler dan masuk Bagian anggaran Departemen Luar Negeri (BA 11)
423169	Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri
	Pendapatan dari luar negeri selain surat perjalanan RI dan pengurusan dokumen konsuler.
42317	Pendapatan Bunga
423171	Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi
	Pendapatan bunga yang bersumber dari investasi atau pembelian surat-surat berharga berupa obligasi
423172	Pendapatan BPPN atas Bunga Obligasi
	Pendapatan bunga yang bersumber dari investasi atau pembelian surat-surat berharga berupa obligasi
423173	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman
	Pendapatan yang berasal dari bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari pemberian piutang tersebut di atas
423179	Pendapatan Bunga Lainnya
	Pendapatan bunga yang bersumber dari investasi atau pembelian surat-surat berharga lainnya
42318	Pendapatan Gain on Bond Redemption
423181	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang
	Pendapatan yang diperoleh dari perbedaan antara nominal dan clean price karena pemerintah membeli kembali SUN (cash buy back) pada harga diskon(dibawah par).
42319	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara
423191	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah
423192	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

4232	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
42321	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
423211	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan
	Penerimaan legalisasi tanda tangan. Masuk Bagian Anggaran Departemen Hukum dan HAM (BA 13)
423212	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan
	Pengesahan surat di bawah tangan. Masuk Bagian Anggaran Departemen Hukum dan HAM (BA 13)
423213	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)
	Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung (BA 05)
423214	Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan sebagainya
	Hasil denda, denda tilang di lingkungan Kejaksaan Agung (BA 06)
423215	Pendapatan Ongkos Perkara
	Pendapatan dari ongkos perkara di lingkungan Kejaksaan Agung (BA 06)
423219	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
	Menampung jenis penerimaan selain pendapatan kejaksaan dan peradilan tersebut diatas
4233	Pendapatan Pendidikan
42331	Pendapatan Pendidikan
423311	Pendapatan Uang Pendidikan
	Uang pendidikan berasal dari Sekolah maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional maupun di departemen lain.
423312	Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan
	Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat dan Akhir pendidikan yang berasal dari Sekolah maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Dep. Pendidikan Nasional (BA 23) maupun di departemen lain.
423313	Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek
	Uang Ujian untuk menjalankan Praktek yang berasal dari Sekolah Maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (BA 23)maupun di departemen lain.
423319	Pendapatan Pendidikan Lainnya
	Uang pendapatan pendidikan lainnya seperti sumbangan pendidikan yg berasal dari Sekolah Maupun PTN yg menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Dep. Pendidikan Nasional (BA 23) maupun di departemen lain.
4234	Pendapatan Lain-lain
42342	Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu
423421	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen
423422	Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen
423423	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen
423424	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinj. LN TAYL
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen
423425	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen
423426	Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen
42343	Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak
423431	Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak
	Penerimaan negara yang berasal dari pendapatan laba bersih penjualan BBM yaitu selisih hasil penjualan BBM dalam negeri dengan biaya pengadaan BBM. Masuk Bagian Anggaran Departemen Keuangan (BA.15.06)
42344	Pendapatan Pelunasan Piutang

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

423441	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara
	Pendapatan yang berasal dari pembayaran cicilan Piutang Non Bendahara. Piutang non bendahara terjadi karena kelalaian pegawai yang menyebabkan kerugian negara di luar pengurusan keuangan negara.
423442	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara
	Pendapatan yang berasal dari pembayaran cicilan TP/TGR bendahara. TP/TGR Bendahara terjadi karena ada kerugian negara yang disebabkan kesalahan atau kelalaian bendahara dalam rangka pengurusan keuangan Negara. Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen.
42345	Pembetulan Pembukuan Belanja Tahun Anggaran Berjalan
423451	Pembetulan Pembukuan Belanja RM TAB
	Pembetulan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
423452	Pembetulan Pembukuan Belanja dari Pinjaman Luar Negeri TAB
	Pembetulan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
423453	Pembetulan Pembukuan Belanja dari Hibah TAB
	Pembetulan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
423454	Pembetulan Pembukuan Belanja Swadana TAB
	Pembetulan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
423455	Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Pajak TAB
	Pembetulan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
423456	Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Bea Masuk TAB
	Pembetulan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
42346	Pembetulan Pembukuan Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu
423461	Pembetulan Pembukuan Belanja RM TAYL
	Pembetulan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
423462	Pembetulan Pembukuan Belanja dari Pinjaman Luar Negeri TAYL
	Pembetulan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
423463	Pembetulan Pembukuan Belanja dari Hibah TAYL
	Pembetulan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
423464	Pembetulan Pembukuan Belanja Swadana TAYL
	Pembetulan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
423465	Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Pajak TAYL
	Pembetulan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
423466	Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Bea Masuk TAYL
	Pembetulan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
42347	Pendapatan Lain-lain
423471	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen
423472	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen
423473	Pendapatan atas Denda Administrasi PBHTB
	Merupakan penerimaan dari Badan Pertanahan Nasional
423474	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional
423475	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal
423476	Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL)

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

	Merupakan pendapatan yang berasal dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL)
423477	Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
	Merupakan penerimaan yang berasal dari Registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang diselenggarakan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
423479	Pendapatan Anggaran Lain-lain
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen.
4235	Pengembalian Pendapatan Penjualan, Sewa, dan Jasa
42351	Pengembalian Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan
423511	Pengembalian Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan (Mata Anggaran 423111)
423512	Pengembalian Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan (Mata Anggaran 423112)
423513	Pengembalian Pendapatan Penjualan Hasil Tambang
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penjualan Hasil Tambang (Mata Anggaran 423113)
423514	Pengembalian Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan (Mata Anggaran 423114)
423515	Pengembalian Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya (Mata Anggaran 423115)
423516	Pengembalian Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya (Mata Anggaran 423116)
423517	Pengembalian Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan (Mata Anggaran 423117)
423518	Pengembalian Pendapatan Penjualan Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penjualan Lainnya (Mata Anggaran 423119)
423519	Pengembalian Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni.
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan dari Penjualan Cadangan Beras pemerintah dalam Rangka Operasi Pasar Murni (423118)
42352	Pengembalian Pendapatan Penjualan Aset
423521	Pengembalian Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah (Mata Anggaran 423121)
423522	Pengembalian Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor (Mata Anggaran 423122)
423523	Pengembalian Pendapatan Penjualan Sewa Beli
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penjualan Sewa Beli (Mata Anggaran 423123)
423524	Pengembalian Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing (Mata Anggaran 423124)
423525	Pengembalian Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan (Mata Anggaran 423129)
42353	Pengembalian Pendapatan Sewa
423531	Pengembalian Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri (Mata Anggaran 423131)
423532	Pengembalian Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang (Mata Anggaran 423132)
423533	Pengembalian Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak (Mata Anggaran 423133)
423539	Pengembalian Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya (Mata Anggaran 423139)
42354	Pengembalian Pendapatan Jasa I
423541	Pengembalian Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya (Mata Anggaran 423141)
423542	Pengembalian Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA)
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA) (Mata Anggaran 423142)
423543	Pengembalian Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB (Mata Anggaran 423143)
423544	Pengembalian Pendapatan Hak dan Perijinan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Hak dan Perijinan (Mata Anggaran 423144)
423545	Pengembalian Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan (Mata Anggaran 423145)
423546	Pengembalian Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, BPN, DJBC
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC (Mata Anggaran 423146)
423547	Pengembalian Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama (Mata Anggaran 423147)
423548	Pengembalian Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian (Mata Anggaran 423148)
423549	Pengembalian Pendapatan Jasa I Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Jasa I Lainnya (Mata Anggaran 423149)
42355	Pengembalian Pendapatan Jasa II
423551	Pengembalian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) (Mata Anggaran 423151)
423552	Pengembalian Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi (Mata Anggaran 423152)
423553	Pengembalian Pendapatan Iuran Lelang untuk Fakir Miskin
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Iuran Lelang untuk Fakir Miskin (Mata Anggaran 423153)
423554	Pengembalian Pendapatan Jasa Catatan Sipil
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Jasa Catatan Sipil (Mata Anggaran 423154)
423555	Pengembalian Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Mata Anggaran 423155)
423556	Pengembalian Pendapatan Uang Pewarganegaraan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Uang Pewarganegaraan (Mata Anggaran 423156)
423557	Pengembalian Pendapatan Bea Lelang
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Bea Lelang (Mata Anggaran 423157)
423558	Pengembalian Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (Mata Anggaran 423158)
423559	Pengembalian Pendapatan Jasa II Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Jasa II Lainnya (Mata Anggaran 423159)
42356	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak dari Luar Negeri

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

423561	Pengembalian Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI (Mata Anggaran 423161)
423562	Pengembalian Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler (Mata Anggaran 423162)
423563	Pengembalian Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri (Mata Anggaran 423169)
42357	Pengembalian Pendapatan Bunga
423571	Pengembalian Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi (Mata Anggaran 423171)
423572	Pengembalian Pendapatan BPPN atas Bunga Obligasi
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan BPPN atas Bunga Obligasi (Mata Anggaran 423172)
423573	Pengembalian Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman (Mata Anggaran 423173)
423574	Pengembalian Pendapatan Bunga Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Bunga Lainnya (Mata Anggaran 423179)
42358	Pengembalian Pendapatan Gain on Bond Redemption
423581	Pengembalian Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang
	Merupakan kontra pos dari pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang (423181)
42359	Pengembalian Pendapatan Premium atas Obligasi Negara
423591	Pengembalian Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Premium Obligasi Negara dalam Negeri/Rupiah (423191)
423592	Pengembalian Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Premium Obligasi Negara dalam Valuta Asing (423192)
4236	Pengembalian Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
42361	Pengembalian Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
423611	Pengembalian Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan (Mata Anggaran 423211)
423612	Pengembalian Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan (Mata Anggaran 423212)
423613	Pengembalian Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) (Mata Anggaran 423213)
423614	Pengembalian Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan sebagainya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan sebagainya (Mata Anggaran 423214)
423615	Pengembalian Pendapatan Ongkos Perkara
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Ongkos Perkara (Mata Anggaran 423215)
423616	Pengembalian Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya (Mata Anggaran 423219)
4237	Pengembalian Pendapatan Pendidikan
42371	Pengembalian Pendapatan Pendidikan
423711	Pengembalian Pendapatan Uang Pendidikan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Uang Pendidikan (Mata Anggaran 423311)
423712	Pengembalian Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan (Mata Anggaran 423312)

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

423713	Pengembalian Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek (Mata Anggaran 423313)
423714	Pengembalian Pendapatan Pendidikan Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Pendidikan Lainnya (Mata Anggaran 423319)
4238	Pengembalian Pendapatan Lain-lain
42381	Pengembalian Pendapatan Lain-lain
423811	Pengembalian Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak (Mata Anggaran 423431)
423812	Pengembalian Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara (Mata Anggaran 423441)
423813	Pengembalian Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara (Mata Anggaran 423442)
423814	Pengembalian Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji (Mata Anggaran 423471)
423815	Pengembalian Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (Mata Anggaran 423472)
423816	Pengembalian Pendapatan atas Denda Administrasi PBHTB
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan atas Denda Administrasi PBHTB (Mata Anggaran 423473)
423817	Pengembalian Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional (Mata Anggaran 423474)
423818	Pengembalian Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal (Mata Anggaran 423475)
423819	Pengembalian Pendapatan Anggaran Lain-lain
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Anggaran Lain-lain (Mata Anggaran 423479)
42382	Pengembalian Pendapatan Lain-lain II
423821	Pengembalian Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL)
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) (Mata Anggaran 423476)
423822	Pengembalian Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Mata Anggaran 423477)
424	Pendapatan PNBP Lainnya I
4241	Pendapatan Gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi
42411	Pendapatan Gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi
424111	Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan
424112	Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara
424113	Pendapatan dari pengembalian penyalahgunaan penyelenggaraan keuangan.
4245	Pengembalian Pendapatan Gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi
42451	Pengembalian Pendapatan Gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi
424511	Pengembalian Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan
	Merupakan kontra pos dari pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan
424512	Pengembalian Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara
	Merupakan kontra pos dari pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

424513	Pengembalian pendapatan dari pengembalian penyalahgunaan penyelenggaraan keuangan.
	Merupakan kontra pos dari pendapatan dari pengembalian penyalahgunaan penyelenggaraan negara
43	Penerimaan Hibah
431	Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri
43111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Perorangan
	Penerimaan hibah dalam negeri yang berasal dari perorangan. (BA.15 atau BA. Departemen terkait)
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Lembaga/Badan Usaha
	Penerimaan hibah dalam negeri yang berasal dari Lembaga/Badan Usaha berbentuk badan hukum. (BA.15 atau BA. Departemen terkait)
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya
	Penerimaan hibah dalam negeri yang tidak dapat dikategorikan berasal dari perorangan maupun Lembaga/Badan Usaha berbentuk badan hukum. (BA.15 atau BA. Departemen terkait)
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Perorangan
	Penerimaan hibah luar negeri yang berasal dari perorangan. (BA.15 atau BA. Departemen terkait)
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Bilateral
	Penerimaan hibah luar negeri yang berasal dari Lembaga Internasional dalam hubungan bilateral. (BA.15 atau BA. Departemen terkait)
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Multilateral
	Penerimaan hibah luar negeri yang berasal dari Lembaga Internasional dalam hubungan multilateral. (BA.15 atau BA. Departemen terkait)
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya
	Penerimaan hibah luar negeri yang tidak dapat dikategorikan berasal Lembaga Internasional baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral. (BA.15 atau BA. Departemen terkait)
432	Pengembalian Pendapatan Hibah
4321	Pengembalian Pendapatan Hibah Dalam Negeri
43211	Pengembalian Pendapatan Hibah Dalam Negeri
432111	Pengembalian Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Perorangan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Perorangan (Mata Anggaran 431111)
432112	Pengembalian Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Lembaga/Badan Usaha
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Lembaga/Badan Usaha (Mata Anggaran 431112)
432119	Pengembalian Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya (Mata Anggaran 431119)
4322	Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri
43221	Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri
432211	Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri – Perorangan
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Hibah Luar Negeri – Perorangan (Mata Anggaran 431211)
432212	Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri – Bilateral
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Hibah Luar Negeri – Bilateral (Mata Anggaran 431212)
432213	Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri – Multilateral
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Hibah Luar Negeri – Multilateral (Mata Anggaran 431213)
432214	Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya (Mata Anggaran 431219)
5	BELANJA NEGARA
51	Belanja Pegawai

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

511	Belanja Gaji dan Tunjangan
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
51111	Belanja Gaji PNS
511111	Belanja Gaji Pokok PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil
51112	Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri PNS
511122	Belanja Tunj. Anak PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak PNS
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural PNS
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional PNS
511125	Belanja Tunj. PPh PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan PPh PNS
511126	Belanja Tunj. Beras PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura.
511127	Belanja Tunj. Kemahalan PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kemahalan PNS
511128	Belanja Tunj. Lauk pauk PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada para pegawai negeri sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik)
511129	Belanja Uang Makan PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan uang makan PNS
51113	Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS
511131	Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan PNS
511132	Belanja Tunj. Cacat PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan cacat PNS
511133	Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan khusus peralihan PNS
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kompensasi kerja PNS, termasuk tunjangan pengaman dan penyelamatan pelayaran, dan tunjangan kesyahbandaran yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE DJA tanggal 28-05-1983 No. SE 74/A.23/1893, tgl 15-11-1993 NO SE 169/A.72/1983 dan tgl 02-12-1987 No. SE 83-/A.198/1987.
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PNS
511136	Belanja Tunj. Kewanitaan PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kewanitaan PNS
511137	Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan guru/dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS
511138	Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan tugas belajar tenaga pengajar biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS
511139	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan khusus PNS Papua
51114	Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS (Staff di Luar Negeri)
511141	Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN)
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan sewa rumah PNS (staff di LN)
511142	Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)
	Pengeluaran untuk penggantian pembayaran tunjangan Pengobatan PNS (staff di LN)
511143	Belanja Tunj. Social Security PNS (Staff di LN)
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan jaminan sosial PNS (staff di LN)
511144	Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN)
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan asuransi kecelakaan PNS (staff di LN)
511145	Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN)
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (staff di LN)
511146	Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (staff di LN)
511147	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri
511148	Belanja Lokal Staff Lainnya
	Pengeluaran untuk pembayaran uang lembur lokal staff
51115	Belanja Tunjangan Umum PNS
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/Polri sesuai peraturan presiden no 12 tahun 2006
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri
51121	Belanja Gaji TNI/POLRI
511211	Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok TNI/POLRI
511219	Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok TNI/POLRI
51122	Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI
511221	Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri TNI/POLRI
511222	Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI
511223	Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI
511224	Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI
511225	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan PPh TNI/POLRI
511226	Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura TNI/POLRI
511227	Belanja Tunj. Kemahalan TNI/POLRI

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kemahalan TNI/POLRI, termasuk tunjangan daerah terpencil POLRI yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE bersama DJA dan Polri No. SE 141/A/2001 dan No. Pol/16/X/2001
511228	Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada Anggota TNI/POLRI sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik)
511229	Belanja Uang Makan TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan uang makan TNI/POLRI
51123	Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI
511231	Belanja Tunj. Anggota Cadangan TNI DDA TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anggota cadangan TNI DDA TNI/POLRI
511232	Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kowan/polwan TNI TNI/POLRI
511233	Belanja Tunj. Babinsa TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Babinsa TNI/POLRI
511234	Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI dan PNS TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan khusus Papua untuk TNI dan PNS TNI/POLRI
511235	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kompensasi kerja bidang persandian TNI TNI/POLRI
511236	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kompensasi kerja bidang persandian PNS TNI/POLRI
511237	Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan brevet TNI/POLRI
511238	Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan keahlian/keterampilan TNI/POLRI
511239	Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan keterampilan khususTNI/POLRI
51124	Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI
511241	Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan MedisTNI/POLRI
511242	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uang duka TNI/POLRI
511243	Belanja Tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan terpencil/sangat terpencil TNI/POLRI
511244	Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum TNI/POLRI sesuai peraturan presiden no 12 tahun 2006
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara
51131	Belanja Gaji Pejabat Negara
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok pejabat negara
511319	Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok pejabat negara
51132	Belanja Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara
511321	Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri pejabat negara
511322	Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak pejabat negara
511323	Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural pejabat negara
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan PPh pejabat negara
511325	Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan beras pejabat negara
51133	Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara
511331	Belanja Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan komunikasi intensif pejabat negara
511332	Belanja Uang Kehematan Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan uang kehematan pejabat negara
511333	Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan paket harian pejabat negara
511334	Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan penunjang kegiatan dewan pejabat negara
511335	Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan pelayanan sidang dan penyelesaian tugas mendesak pejabat negara
511336	Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan pembinaan kegiatan dan khusus BPK pejabat negara
511337	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uang duka pejabat negara
5114	Belanja Pegawai Perjan
51141	Belanja Pegawai Perjan
511411	Belanja Pegawai Perjan
	Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok pegawai perjanjian
511412	Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka Pegawai Perjan
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uang duka pegawai perjanjian
511419	Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Perjan
	Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok pegawai perjanjian
5115	Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
51151	Pengembalian Belanja Gaji PNS
511511	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Gaji Pokok PNS (Mata Anggaran 511111)
511519	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembulatan Gaji PNS (Mata Anggaran 511119)
51152	Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS
511521	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (Mata Anggaran 511121)
511522	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Anak PNS (Mata Anggaran 511122)
511523	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Struktural PNS (Mata Anggaran 511123)
511524	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Fungsional PNS (Mata Anggaran 511124)

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

511525	Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. PPh PNS (Mata Anggaran 511125)
511526	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Beras PNS (Mata Anggaran 511126)
511527	Pengembalian Belanja Tunj. Kemahalan PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Kemahalan PNS (Mata Anggaran 511127)
511528	Pengembalian Belanja Tunj. Lauk pauk PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Lauk pauk PNS (Mata Anggaran 511128)
511529	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Uang Makan PNS (Mata Anggaran 511129)
51153	Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS
511531	Pengembalian Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS (Mata Anggaran 511131)
511532	Pengembalian Belanja Tunj. Cacat PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Cacat PNS (Mata Anggaran 511132)
511533	Pengembalian Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS (Mata Anggaran 511133)
511534	Pengembalian Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS (Mata Anggaran 511134)
511535	Pengembalian Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS (Mata Anggaran 511135)
511536	Pengembalian Belanja Tunj. Kewanitaan PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Kewanitaan PNS (Mata Anggaran 511136)
511537	Pengembalian Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS (Mata Anggaran 511137)
511538	Pengembalian Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS (Mata Anggaran 511138)
511539	Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS (Mata Anggaran 511139)
51154	Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS (Staff di Luar Negeri)
511541	Pengembalian Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di Luar Negeri)
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN) (Mata Anggaran 511141)
511542	Pengembalian Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di Luar Negeri)
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN) (Mata Anggaran 511142)
511543	Pengembalian Belanja Tunj. Social Security PNS (Staff di Luar Negeri)
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Social Security PNS (Staff di LN) (Mata Anggaran 511143)
511544	Pengembalian Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di Luar Negeri)
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN) (Mata Anggaran 511144)
511545	Pengembalian Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di Luar Negeri)
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN) (Mata Anggaran 511145)
511546	Pengembalian Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN) (Mata Anggaran 511146)
511547	Pengembalian Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri (Mata Anggaran 511147)
511548	Pengembalian Belanja Lokal Staff Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Lokal Staff Lainnya (Mata Anggaran 511148)
51155	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS
511551	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunjangan Umum PNS (Mata Anggaran 511151)
5116	Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri
51161	Pengembalian Belanja Gaji TNI/Polri
511611	Pengembalian Belanja Gaji Pokok TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (Mata Anggaran 511211)
511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (Mata Anggaran 511219)
51162	Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/Polri
511621	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (Mata Anggaran 511221)
511622	Pengembalian Belanja Tunj. Anak TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (Mata Anggaran 511222)
511623	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (Mata Anggaran 511223)
511624	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI (Mata Anggaran 511224)
511625	Pengembalian Belanja Tunj. PPh TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI (Mata Anggaran 511225)
511626	Pengembalian Belanja Tunj. Beras TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI (Mata Anggaran 511226)
511627	Pengembalian Belanja Tunj. Kemahalan TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Kemahalan TNI/POLRI (Mata Anggaran 511227)
511628	Pengembalian Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI (Mata Anggaran 511228)
511629	Pengembalian Belanja Uang Makan TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Uang Makan TNI/POLRI (Mata Anggaran 511229)
51163	Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/Polri
511631	Pengembalian Belanja Tunj. Anggota Cadangan TNI DDA TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Anggota Cadangan TNI DDA TNI/POLRI (Mata Anggaran 511231)
511632	Pengembalian Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI (Mata Anggaran 511232)
511633	Pengembalian Belanja Tunj. Babinsa TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Babinsa TNI/POLRI (Mata Anggaran 511233)
511634	Pengembalian Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI dan PNS TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI dan PNS TNI/POLRI (Mata Anggaran 511234)
511635	Pengembalian Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI TNI/Polri

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI TNI/POLRI (Mata Anggaran 511235)
511636	Pengembalian Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/POLRI (Mata Anggaran 511236)
511637	Pengembalian Belanja Tunj. Brevet TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI (Mata Anggaran 511237)
511638	Pengembalian Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI (Mata Anggaran 511238)
511639	Pengembalian Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI (Mata Anggaran 511239)
51164	Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI
511641	Pengembalian Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI (Mata Anggaran 511241)
511642	Pengembalian Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka TNI/POLRI (Mata Anggaran 511242)
511643	Pengembalian Belanja Tunjangan Daerah terpencil/sangat terpencil TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil TNI/Polri (Mata Anggaran 511243)
511644	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (Mata Anggaran 511244)
5117	Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara
51171	Pengembalian Belanja Gaji Pejabat Negara
511711	Pengembalian Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara (Mata Anggaran 511311)
511719	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara (Mata Anggaran 511319)
51172	Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara
511721	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara (Mata Anggaran 511321)
511722	Pengembalian Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara (Mata Anggaran 511322)
511723	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara (Mata Anggaran 511323)
511724	Pengembalian Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara (Mata Anggaran 511324)
511725	Pengembalian Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara (Mata Anggaran 511325)
51173	Pengembalian Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara
511731	Pengembalian Belanja Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara (Mata Anggaran 511331)
511732	Pengembalian Belanja Uang Kehematan Pejabat Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Uang Kehematan Pejabat Negara (Mata Anggaran 511332)
511733	Pengembalian Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara (Mata Anggaran 511333)
511734	Pengembalian Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara (Mata Anggaran 511334)

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

511735	Pengembalian Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara (Mata Anggaran 511335)
511736	Pengembalian Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara (Mata Anggaran 511336)
511737	Pengembalian Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka Pejabat Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka Pejabat Negara (Mata Anggaran 511337)
5118	Pengembalian Belanja Pegawai Perjan
51181	Pengembalian Belanja Pegawai Perjan
511811	Pengembalian Belanja Pegawai Perjan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pegawai Perjan (Mata Anggaran 511411)
511812	Pengembalian Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka Pegawai Perjan (Mata Anggaran 511412)
511819	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Perjan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Perjan (Mata Anggaran 511419)
5119	Belanja Gaji Dokter PTT
51191	Belanja Gaji Dokter PTT
511911	Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT
	Pengeluaran untuk pembayaran gaji Dokter dan Bidan PTT
511912	Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan pajak PPh Dokter dan Bidan PTT
511913	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT
511914	Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Dokter dan Bidan PTT
51192	Pengembalian Belanja Gaji Dokter PTT
511921	Pengembalian Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT
	Merupakan kontra pos dari Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT (Mata Anggaran 511911)
511922	Pengembalian Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT (Mata Anggaran 511912)
511923	Pengembalian Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT (Mata Anggaran 511913)
511924	Pengembalian Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT (Mata Anggaran 511914)
512	Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
5121	Belanja Honorarium
51211	Belanja Honorarium
512111	Belanja Uang Honor Tetap
	Pengeluaran untuk pembayaran honorarium tetap
512112	Belanja Uang Honor Tidak Tetap
	Pengeluaran untuk pembayaran honorarium tidak tetap
5122	Belanja Lembur
51221	Belanja Lembur
512211	Belanja uang lembur
	Pengeluaran untuk pembayaran uang lembur.
5123	Belanja Vakasi

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

51231	Belanja Vakasi
512311	Belanja Vakasi
	Pengeluaran untuk pembayaran vakasi.
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
51241	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
512411	Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan)
	Digunakan untuk pembayaran tunjangan khusus/tunjangan dan pembiayaan kepegawaian lainnya di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
512412	Belanja Pegawai Transito
	Digunakan untuk pengeluaran sebagian belanja pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi.
5125	Pengembalian Belanja Honorarium
51251	Pengembalian Belanja Honorarium
512511	Pengembalian Belanja Uang Honor Tetap
	Merupakan kontra pos dari Belanja Uang Honor Tetap (Mata Anggaran 512111)
512512	Pengembalian Belanja Uang Honor Tidak Tetap
	Merupakan kontra pos dari Belanja Uang Honor Tidak Tetap (Mata Anggaran 512112)
5126	Pengembalian Belanja Lembur
51261	Pengembalian Belanja Lembur
512611	Pengembalian Belanja uang lembur
	Merupakan kontra pos dari Belanja uang lembur (Mata Anggaran 512211)
5127	Pengembalian Belanja Vakasi
51271	Pengembalian Belanja Vakasi
512711	Pengembalian Belanja Vakasi
	Merupakan kontra pos dari Belanja Vakasi (Mata Anggaran 512311)
5128	Pengembalian Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
51281	Pengembalian Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
512811	Pengembalian Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan)
	Merupakan kontra pos dari Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan) (Mata Anggaran 512411)
512812	Pengembalian Belanja Pegawai Transito
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pegawai Transito (Mata Anggaran 512412)
513	Belanja Kontribusi Sosial
5131	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu
51311	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara
513111	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi PNS yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anggota partai politik.
513112	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi pejabat negara yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anggota partai politik.
513113	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Dephan
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi PNS TNI/ Dephan yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anggota partai politik.
513114	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi PNS Polri yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anggota partai politik.
51312	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri
513121	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama)
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi TNI/ Polri yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anggota partai politik.

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

513122	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Dephan
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi TNI/ Polri yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anggota partai politik.
513123	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi TNI/ Polri yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anggota partai politik.
51313	Belanja Tunjangan Hari Tua
513131	Belanja Tunjangan Hari Tua/Unfunded liability
	Digunakan untuk pembayaran kewajiban pemerintah berupa Unfunded Liability (kekurangan Pendanaan) atas kenaikan Gaji Pokok Pegawai
5132	Belanja Asuransi Kesehatan
51321	Belanja Askes PNS/Pejabat Negara
513211	Belanja Askes PNS
	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes PNS
513212	Belanja Askes Pejabat Negara
	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Pejabat Negara
51322	Belanja Askes Penerima Pensiun
513221	Belanja Askes Penerima Pensiun
	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Penerima Pensiun
51323	Belanja Askes TNI/Dephan
513231	Belanja Askes TNI/Dephan
	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes TNI/Dephan
51324	Belanja Askes Polri
513241	Belanja Askes Polri
	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Polri
51325	Belanja Askes Veteran
513251	Belanja Askes Veteran
	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Veteran
5133	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
51331	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
513311	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Non Tuvet
	Digunakan untuk pembayaran belanja tunjangan kesehatan veteran non tuvet
5134	Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu
51341	Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara
513411	Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS (Mata Anggaran 513111)
513412	Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara (Mata Anggaran 513112)
513413	Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Dephan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Dephan (Mata Anggaran 513113)
513414	Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri (Mata Anggaran 513114)
51342	Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri
513421	Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama)
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama) (Mata Anggaran 513121)
513422	Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Dephan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Dephan (Mata Anggaran 513122)
513423	Pengembalian Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

	Merupakan kontra pos dari Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri (Mata Anggaran 513123)
51343	Pengembalian Belanja Tunjangan Hari Tua
513431	Pengembalian Belanja Tunjangan Hari Tua/Unfunded liability
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunjangan Hari Tua/Unfunded liability (513131)
5135	Pengembalian Belanja Asuransi Kesehatan
51351	Pengembalian Belanja Askes PNS/Pejabat Negara
513511	Pengembalian Belanja Askes PNS
	Merupakan kontra pos dari Belanja Askes PNS (Mata Anggaran 513211)
513512	Pengembalian Belanja Askes Pejabat Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Askes Pejabat Negara (Mata Anggaran 513212)
51352	Pengembalian Belanja Askes Penerima Pensiun
513521	Pengembalian Belanja Askes Penerima Pensiun
	Merupakan kontra pos dari Belanja Askes Penerima Pensiun (Mata Anggaran 513221)
51353	Pengembalian Belanja Askes TNI/Dephan
513531	Pengembalian Belanja Askes TNI/Dephan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Askes TNI/Dephan (Mata Anggaran 513231)
51354	Pengembalian Belanja Askes Polri
513541	Pengembalian Belanja Askes Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Askes Polri (Mata Anggaran 513241)
51355	Pengembalian Belanja Askes Veteran
513551	Pengembalian Belanja Askes Veteran
	Merupakan kontra pos dari Belanja Askes Veteran (Mata Anggaran 513251)
5136	Pengembalian Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
51361	Pengembalian Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
513611	Pengembalian Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Non Tuvet
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Non Tuvet (Mata Anggaran 513311)
52	Belanja Barang
521	Belanja Barang
5211	Belanja Barang Operasional
52111	Belanja Barang Operasional
521111	Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran
	Pengeluaran untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang TUPOKSI Kementerian negara/ lembaga terdiri dari :
	- Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu pengadaan barang yang habis dipakai antara lain pembelian alat-alat tulis, barang cetak, alat-alat rumah tangga, pengiriman surat/kawat, langganan surat kabar/berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu
	- Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya Satpam/pengamanan kantor, biaya sewa gedung, telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan sertifikat tanah, pembayaran PBB
521112	Belanja Inventaris Kantor
	Pengeluaran untuk membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker.
521113	Belanja pengadaan bahan makanan
	Pengeluaran untuk membiayai pengadaan bahan makanan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional seperti pengadaan bahan makanan yang diberikan antara lain kepada narapidana, tahanan Kejaksaan, tahanan imigrasi, pasien rumah sakit, anak asuhan (panti) tuna sosial, mahasiswa penerbang,
521114	Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKSI (bersifat kontraktual)
	Pengeluaran untuk membiayai pengadaan barang untuk pelaksanaan TUPOKSI yang bersifat kontraktual
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya
	Pengeluaran untuk membiayai pengadaan barang untuk tujuan operasional yang tidak termasuk dalam Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran, Inventaris Kantor, pengadaan bahan makanan dan barang untuk pelaksanaan TUPOKSI yang bersifat kontraktual

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

5212	Belanja Barang Non Operasional
52121	Belanja Barang Non Operasional
521211	Belanja Bahan
	Digunakan untuk pengeluaran biaya memperoleh bahan (yang habis dipakai) yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan non operasional seperti pengadaan bahan makanan untuk keperluan dies natalis, pameran, pelantikan pejabat, sosialisasi,rapat
521212	Belanja Barang Transit
	Digunakan untuk pengeluaran pembiayaan belanja barang pada kantor-kantor (UPT) di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi.
521213	Belanja Barang Perjan
	Digunakan untuk pengeluaran belanja barang pada kantor-kantor yang berubah status menjadi Perusahaan Jawatan (seperti Perjan TVRI dan RRI)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran biaya-biaya Crash Program.
5213	Pengembalian Belanja Barang Operasional
52131	Pengembalian Belanja Barang Operasional
521311	Pengembalian Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran
	Merupakan kontra pos dari Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (Mata Anggaran 521111)
521312	Pengembalian Belanja Inventaris Kantor
	Merupakan kontra pos dari Belanja Inventaris Kantor (Mata Anggaran 521112)
521313	Pengembalian Belanja pengadaan bahan makanan
	Merupakan kontra pos dari Belanja pengadaan bahan makanan (Mata Anggaran 521113)
521314	Pengembalian Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKSI (bersifat kontraktual)
	Merupakan kontra pos dari Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKSI (bersifat kontraktual) (Mata Anggaran 521114)
521319	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Barang Operasional Lainnya (Mata Anggaran 521119)
5214	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional
52141	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional
521411	Pengembalian Belanja Bahan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bahan (Mata Anggaran 521211)
521412	Pengembalian Belanja Barang Transit
	Merupakan kontra pos dari Belanja Barang Transit (Mata Anggaran 521212)
521413	Pengembalian Belanja Barang Perjan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Barang Perjan (Mata Anggaran 521213)
521419	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Mata Anggaran 521219)
522	Belanja Jasa
5221	Belanja Jasa
52211	Belanja Jasa
522111	Belanja Langganan daya dan jasa
	Digunakan untuk pembayaran langganan daya dan jasa seperti listrik, telepon, air, dan gas
522112	Belanja Jasa pos dan giro
	Digunakan untuk pembayaran jasa perbendaharaan yang telah dilaksanakan oleh kantor pos diseluruh Indonesia
522113	Belanja Pengeluaran bebas porto
	Digunakan untuk pembayaran pengiriman surat dinas bagi instansi Pemerintah yang dana pengirimannya tidak dialokasikan dalam DIPA atau dokumen yang dipersamakan
522114	Belanja Pembiayaan surveyor
	Digunakan untuk pembayaran surveyor
522115	Belanja Jasa Konsultan
	Digunakan untuk pembayaran jasa konsultan termasuk jasa pengacara

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

522116	Belanja Sewa
	Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa kantor atau sewa lainnya)
522119	Belanja Jasa Lainnya
	Digunakan untuk pembayaran pekerjaan yang bersifat non fisik lainnya (jasa lainnya)
5222	Pengembalian Belanja Jasa
52221	Pengembalian Belanja Jasa
522211	Pengembalian Belanja Langganan daya dan jasa
	Merupakan kontra pos dari Belanja Langganan daya dan jasa (Mata Anggaran 522111)
522212	Pengembalian Belanja Jasa pos dan giro
	Merupakan kontra pos dari Belanja Jasa pos dan giro (Mata Anggaran 522112)
522213	Pengembalian Belanja Pengeluaran bebas porto
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran bebas porto (Mata Anggaran 522113)
522214	Pengembalian Belanja Pembiayaan surveyor
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembiayaan surveyor (Mata Anggaran 522114)
522215	Pengembalian Belanja Jasa Konsultan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Jasa Konsultan (Mata Anggaran 522115)
522216	Pengembalian Belanja Sewa
	Merupakan kontra pos dari Belanja Sewa (Mata Anggaran 522116)
522219	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Jasa Lainnya (Mata Anggaran 522119)
523	Belanja Pemeliharaan
5231	Belanja Pemeliharaan
52311	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
	Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari 10% (termasuk cleaning service) dan pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam kondisi semula, serta tidak memenuhi syarat kapitalisasi suatu aset
523112	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
	Pengeluaran untuk membiayai pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pejabat seperti istana negara, Jabatan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota/Mahkamah Agung/Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Pimpinan/Ketua Lembaga Non departemen/Tni/Polri/asrama yang terdapat di semua Departemen/Lembaga Non Departemen, termasuk TNI, Polri/Aula yang pisah dengan Gedung Kantor/Gedung Kesenian, Art Center/Gedung Museum beserta isinya termasuk taman pagar agara dalam kondisi normal.
52312	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal
523122	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin yang tidak tertampung dalam pos biaya pemeliharaanperalatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal
52313	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
523131	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jalan dan jembatan agar berada dalam kondisi normal
523132	Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan irigasi agar berada dalam kondisi normal
523133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jaringan agar berada dalam kondisi normal

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

52314	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
523149	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
	Pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi normal termasuk pemeliharaan tempat ibadah, bangunan bersejarah seperti candi, bangunan peninggalan Belanda , Jepang yang belum diubah posisinya, kondisi bangunan/Bangunan Keraton/Puri bekas kerajaan,bangunan cagar valam, cagar budaya, makam yang memilki nilai sejarah
5232	Pengembalian Belanja Pemeliharaan
52321	Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523211	Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Mata Anggaran 523111)
523212	Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya (Mata Anggaran 523112)
52322	Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523221	Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
	Merupakan kontra pos dari Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Mata Anggaran 523121)
523222	Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Mata Anggaran 523122)
52323	Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
523231	Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Mata Anggaran 523131)
523232	Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi
	Merupakan kontra pos dari Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi (Mata Anggaran 523132)
523233	Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan (Mata Anggaran 523133)
52324	Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
523249	Pengembalian Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya (Mata Anggaran 523149)
524	Belanja Perjalanan
5241	Belanja Perjalanan
52411	Belanja Perjalanan
524111	Belanja perjalanan biasa
	Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan TUPOKSI kementerian negara/lembaga seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan
524112	Belanja perjalanan tetap
	Pengeluaran untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas .
524119	Belanja perjalanan lainnya
	Pengeluaran untuk perjalanan lainnya yang tidak tertampung di dalam pos belanja perjalanan biasa dan tetap antara lain antara lain biaya perjalanan mutasi pensiun, pengiriman jenazah
5242	Pengembalian Belanja Perjalanan
52421	Pengembalian Belanja Perjalanan
524211	Pengembalian Belanja perjalanan biasa
	Merupakan kontra pos dari Belanja perjalanan biasa (Mata Anggaran 524111)
524212	Pengembalian Belanja perjalanan tetap
	Merupakan kontra pos dari Belanja perjalanan tetap (Mata Anggaran 524112)
524219	Pengembalian Belanja perjalanan lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja perjalanan lainnya (Mata Anggaran 524119)
53	Belanja Modal

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

531	Belanja Modal Tanah
5311	Belanja Modal Tanah
53111	Belanja Modal Tanah
531111	Belanja Modal Tanah
	Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran - pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/ pakai.
5312	Pengembalian Belanja Modal Tanah
53121	Pengembalian Belanja Modal Tanah
531211	Pengembalian Belanja Modal Tanah
	Merupakan kontra pos dari Belanja Modal Tanah (Mata Anggaran 531111)
532	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
	Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat dan efisiensi peralatan dan mesin
5322	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
53221	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532211	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
	Merupakan kontra pos dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Mata Anggaran 532111)
533	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
53311	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
	Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.
5332	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan
53321	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533211	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Mata Anggaran 533111)
534	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
53411	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat dan efisiensi jalan dan jembatan.
534112	Belanja Modal Irigasi
	Pengeluaran untuk memperoleh irigasi sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai irigasi tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat dan efisiensi irigasi.
534113	Belanja Modal Jaringan
	Pengeluaran untuk memperoleh jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat dan efisiensi jaringan.
5342	Pengembalian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
53421	Pengembalian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
534211	Pengembalian Belanja Modal Jalan dan Jembatan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Modal Jalan dan Jembatan (Mata Anggaran 534111)
534212	Pengembalian Belanja Modal Irigasi
	Merupakan kontra pos dari Belanja Modal Irigasi (Mata Anggaran 534112)

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

534213	Pengembalian Belanja Modal Jaringan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Modal Jaringan (Mata Anggaran 534113)
535	Belanja Modal Fisik Lainnya
5351	Belanja Modal Fisik Lainnya
53511	Belanja Modal Fisik Lainnya
535111	Belanja Modal Fisik Lainnya
	Pengeluaran untuk memperoleh modal fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal non fisik sampai siap pakai. Termasuk dalam belanja modal ini : kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian , barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum serta hewan ternak selain untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat, buku-buku dan jurnal ilmiah.
5352	Pengembalian Belanja Modal Fisik Lainnya
53521	Pengembalian Belanja Modal Fisik Lainnya
535211	Pengembalian Belanja Modal Fisik Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Modal Fisik Lainnya (Mata Anggaran 535111)
54	Belanja Pembayaran Bunga Utang
541	Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri
5411	Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri - Jangka Pendek
54111	Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan
541111	Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan
	Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap penerbitan Surat Utang perbendaharaan dalam negeri dan Surat Berharga lainnya
541119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Surat Utang Perbendaharaan
	Digunakan untuk pengeluaran kewajiban pemerintah lainnya terhadap bunga utang dalam negeri
54112	Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya
541121	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak)
	Digunakan untuk pembayaran imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan pajak (restitusi)
541122	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan - Jangka Pendek
	Digunakan untuk pembayaran imbalan bunga atas pinjaman perbankan
541123	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai)
	Digunakan untuk pembayaran imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan bea dan cukai.
541129	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya
	Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya - Bunga dalam negeri jangka pendek lainnya.
5412	Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri - Jangka Pendek
54121	Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan
541211	Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan (Mata Anggaran 541111)
541219	Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Surat Utang Perbendaharaan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Surat Utang Perbendaharaan (Mata Anggaran 541119)
54122	Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya
541221	Pengembalian Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB)
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak) (Mata Anggaran 541121)
541222	Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan - Jangka Pendek
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan - Jangka Pendek (Mata Anggaran 541122)
541223	Pengembalian Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai)
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai) (Mata Anggaran 541123)

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

541229	Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya (Mata Anggaran 541129)
5413	Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Panjang
54131	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara
541311	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah
	Digunakan untuk pembayaran beban bunga Obligasi Dalam Negeri yang harus dibayar oleh pemerintah
541319	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara
	Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara
54132	Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya
541321	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan - Jangka Panjang
	Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap pinjaman perbankan
541329	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran rutin pembayaran biaya/kewajiban Bunga Obligasi Negara lainnya
5414	Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Panjang
54141	Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara
541411	Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah (Mata Anggaran 541311)
541419	Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara (Mata Anggaran 541319)
54142	Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya
541421	Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan - Jangka Panjang
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan - Jangka Panjang (Mata Anggaran 541321)
541429	Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya (Mata Anggaran 541329)
542	Belanja Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri
5421	Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Pendek
54211	Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Negara
542111	Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan – Valas
	Digunakan untuk pembayaran beban bunga Surat Utang Perbendaharaan dalam bentuk valas yang harus dibayar oleh pemerintah
542119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Surat Utang Negara
	Digunakan untuk pengeluaran rutin pembayaran biaya/kewajiban lainnya - Bunga Surat Utang Negara
5422	Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Pendek
54221	Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Negara
542211	Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan – Valas
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan – Valas (Mata Anggaran 542111)
542219	Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Surat Utang Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Surat Utang Negara (Mata Anggaran 542119)
5423	Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Panjang
54231	Belanja Bunga Pinjaman program
542311	Belanja Bunga Pinjaman Program
	Digunakan untuk pembayaran beban bunga pinjaman program atau nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan.
542319	Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program
	Digunakan untuk pengeluaran biaya/kewajiban pemerintah lainnya terhadap utang luar negeri jangka panjang dalam rangka pinjaman program.
54232	Belanja Bunga Pinjaman proyek

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

542321	Belanja Bunga Pinjaman Proyek
	Digunakan untuk pembayaran beban bunga pinjaman proyek atau nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri di luar pinjaman program.
542329	Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek
	Digunakan untuk pengeluaran biaya/kewajiban pemerintah lainnya terhadap utang luar negeri jangka panjang dalam rangka pinjaman proyek
54233	Belanja Bunga Obligasi Negara
542331	Belanja Bunga Obligasi Negara – Valas
	Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap penerbitan Obligasi pemerintah dalam bentuk valas
542339	Belanja Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Obligasi Negara
	Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya dan bunga Obligasi negara yang harus dibayar oleh pemerintah
54234	Belanja Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
542341	Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program
	Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program
542342	Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek
	Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek
542349	Belanja Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
	Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya - bunga utang LN melalui penjadualan kembali pinjaman
5424	Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Panjang
54241	Pengembalian Belanja Bunga Pinjaman program
542411	Pengembalian Belanja Bunga Pinjaman Program
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bunga Pinjaman Program (Mata Anggaran 542311)
542419	Pengembalian Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program
	Merupakan kontra pos dari Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program (Mata Anggaran 542319)
54242	Pengembalian Belanja Bunga Pinjaman proyek
542421	Pengembalian Belanja Bunga Pinjaman Proyek
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bunga Pinjaman Proyek (Mata Anggaran 542321)
542429	Pengembalian Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek
	Merupakan kontra pos dari Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek (Mata Anggaran 542329)
54243	Pengembalian Belanja Bunga Obligasi Negara
542431	Pengembalian Biaya Obligasi Negara – Valas
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bunga Obligasi Negara – Valas (Mata Anggaran 542331)
542439	Pengembalian Belanja Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Obligasi Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Obligasi Negara (Mata Anggaran 542339)
54244	Pengembalian Belanja Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
542441	Pengembalian Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program (Mata Anggaran 542341)
542442	Pengembalian Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek (Mata Anggaran 542342)
542449	Pengembalian Belanja Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
	Merupakan kontra pos dari Belanja Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman (Mata Anggaran 542349)
543	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri
5431	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri
54311	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
543111	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
	Digunakan untuk pembayaran discount yang diberikan atas penerbitan surat utang perbendaharaan Negara Dalam Negeri.

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

543119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
	Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Utang Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
54312	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
543121	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
	Digunakan untuk pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
543129	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
	Digunakan untuk Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
5432	Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri
54321	Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
543211	Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri (Mata Anggaran 543111)
543219	Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri (Mata Anggaran 543119)
54322	Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
543221	Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri (Mata Anggaran 543121)
543229	Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Obligasi Negara Dalam Negeri (Mata Anggaran 543129)
544	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri
5441	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri
54411	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Perbendaharaan Negara Luar Negeri
544111	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
	Digunakan untuk pembayaran Discount Surat Utang Perbendaharaan Negara Luar Negeri
544119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
	Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Utang Perbendaharaan Negara Luar Negeri
54412	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri
544121	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri
	Digunakan untuk pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri
544129	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Obligasi Negara Luar Negeri
	Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Obligasi Negara Luar Negeri
5442	Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri
54421	Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
544211	Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri (Mata Anggaran 544111)
544219	Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri (Mata Anggaran 544119)
54422	Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri
544221	Pengembalian Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri (Mata Anggaran 544121)
544229	Pengembalian Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Obligasi Negara Luar Negeri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Obligasi Negara Luar Negeri (Mata Anggaran 544129)
545	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

5451	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri
54511	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri
545111	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang
	Digunakan untuk pembayaran biaya yang terjadi dari perbedaan antara nominal dan clean price karena pemerintah membeli kembali SUN (cash buy back) pada harga premium (di atas par)
5455	Pengembalian Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri
54551	Pengembalian Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri
545511	Pengembalian Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang
	Merupakan Kontra pos dari Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang (545111)
55	Belanja Subsidi
551	Belanja Subsidi Perusahaan Negara
5511	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
551111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan - Perusahaan Negara
	Digunakan untuk pembayaran subsidi melalui lembaga keuangan misalnya subsidi bunga KPR
5512	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - BBM
55121	Belanja Subsidi BBM
551211	Belanja Subsidi Avgas
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi avgas yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan avgas.
551212	Belanja Subsidi Avtur
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi avtur yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan avtur.
551213	Belanja Subsidi Premium
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi premium yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan premium.
551214	Belanja Subsidi Minyak Bakar
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak bakar yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak bakar.
551215	Belanja Subsidi Minyak Solar
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak solar yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak solar.
551216	Belanja Subsidi Minyak Diesel
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak diesel yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak diesel.
551217	Belanja Subsidi Minyak Tanah
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak tanah yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak tanah.
5513	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - Non BBM
55131	Belanja Subsidi Non-BBM - Harga/Biaya
551311	Belanja Subsidi pangan
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih harga yang diberikan kepada BULOG atas penyaluran beras OPK kepada Keluarga Miskin dengan perhitungan berdasarkan selisih antara harga jual beras OPK (Rp. 1.000,00) dengan Harga Pokok Beras BULOG.
551312	Belanja Subsidi listrik
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi dalam rangka menutup defisit arus kas operasi PT. PLN (Persero). Subsidi ini diberikan akibat harga jual listrik yang ditentukan oleh Pemerintah lebih rendah dibandingkan biaya produksi listrik oleh PT. PLN (Persero
551313	Belanja Subsidi benih
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih harga benih yang diberikan kepada petani melalui BUMN Benih terhadap penjualan benih padi dan kedele dibanding dengan biaya produksinya.

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

551314	Belanja Subsidi obat
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih kurs atas pembelian impor bahan baku obat yang digunakan untuk pembuatan obat-obatan generik, alat kesehatan dan Keluarga Berencana.
551315	Belanja Subsidi gula
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi harga yang diberikan kepada petani melalui Pabrik Gula atas selisih harga jual gula petani dengan provenue yang ditetapkan oleh Pemerintah.
551316	Belanja Subsidi pupuk
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi harga yang diberikan kepada petani melalui Pabrik Pupuk atas selisih harga jual pupuk dengan provenue yang ditetapkan oleh Pemerintah.
551319	Belanja Subsidi harga/biaya lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selain subsidi pupuk, subsidi gula, subsidi obat, subsidi benih,subsidi pangan dan subsidi listrik.
55132	Belanja Subsidi Non-BBM - Bunga Kredit
551321	Belanja Subsidi Bunga KUT
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Usaha Tani (KUT)
551322	Belanja Subsidi Bunga KOP PIR
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi Anggota Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi
551323	Belanja Subsidi Bunga KOP
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi (KKop)
551324	Belanja Subsidi Bunga KOP PRIM
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA)
551325	Belanja Subsidi Bunga KPR
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana
551326	Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Ketahanan Pangan (KKP)
551329	Belanja Subsidi Bunga kredit program lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Program Lainnya.
55133	Belanja Subsidi Non-BBM - Pajak
551331	Belanja Subsidi PPh
	Digunakan untuk menampung pengeluaran negara atas pembayaran PPh yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
551332	Belanja Subsidi PPN
	Digunakan untuk menampung pengeluaran negara atas pembayaran PPN yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
551333	Belanja Subsidi BM
	Digunakan untuk menampung pengeluaran negara atas pembayaran BM yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
55134	Belanja Subsidi Non-BBM - Lainnya
551341	Belanja Subsidi haji
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih kurs yang diberikan kepada jamaah haji terhadap perubahan kurs dibandingkan kurs dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
551342	Belanja Subsidi kendaraan bermotor

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

	Digunakan untuk pengeluaran subsidi bunga kredit yang diberikan kepada anggota lembaga tinggi negara (DPR, DPA, MA, BPK) serta para pejabat eselon dalam Pemerintahan untuk pengadaan kendaraan perorangan.
551349	Belanja Subsidi lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5514	Belanja Subsidi Lembaga Non-Kuangan - PSO
55141	Belanja Subsidi dalam rangka PSO
551411	Belanja Subsidi PT KAI
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada PT. Kereta Api Indonesia.
551412	Belanja Subsidi PT PELNI
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada PT. PELNI
551413	Belanja Subsidi PT Pos dan Giro
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada PT. Pos Indoesia
551414	Belanja Subsidi TVRI
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada TVRI
551415	Belanja Subsidi BULOG
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada BULOG
551419	Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan dalam rangka PSO lainnya
5515	Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55151	Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
551511	Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Keuangan - Perusahaan Negara
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Lembaga Keuangan - Perusahaan Negara (Mata Anggaran 551111)
5516	Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Non-Kuangan - BBM
55161	Pengembalian Belanja Subsidi BBM
551611	Pengembalian Belanja Subsidi Avgas
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Avgas (Mata Anggaran 551211)
551612	Pengembalian Belanja Subsidi Avtur
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Avtur (Mata Anggaran 551212)
551613	Pengembalian Belanja Subsidi Premium
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Premium (Mata Anggaran 551213)
551614	Pengembalian Belanja Subsidi Minyak Bakar
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Minyak Bakar (Mata Anggaran 551214)
551615	Pengembalian Belanja Subsidi Minyak Solar
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Minyak Solar (Mata Anggaran 551215)
551616	Pengembalian Belanja Subsidi Minyak Diesel
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Minyak Diesel (Mata Anggaran 551216)
551617	Pengembalian Belanja Subsidi Minyak Tanah
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Minyak Tanah (Mata Anggaran 551217)
5517	Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Non-Kuangan - Non BBM
55171	Pengembalian Belanja Subsidi Non-BBM - Harga/Biaya
551711	Pengembalian Belanja Subsidi pangan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi pangan (Mata Anggaran 551311)
551712	Pengembalian Belanja Subsidi listrik
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi listrik (Mata Anggaran 551312)
551713	Pengembalian Belanja Subsidi benih
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi benih (Mata Anggaran 551313)

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

551714	Pengembalian Belanja Subsidi obat
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi obat (Mata Anggaran 551314)
551715	Pengembalian Belanja Subsidi gula
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi gula (Mata Anggaran 551315)
551716	Pengembalian Belanja Subsidi pupuk
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi pupuk (Mata Anggaran 551316)
551719	Pengembalian Belanja Subsidi harga/biaya lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi harga/biaya lainnya (Mata Anggaran 551319)
55172	Pengembalian Belanja Subsidi Non-BBM - Bunga Kredit
551721	Pengembalian Belanja Subsidi Bunga KUT
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Bunga KUT (Mata Anggaran 551321)
551722	Pengembalian Belanja Subsidi Bunga KOP PIR
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Bunga KOP PIR (Mata Anggaran 551322)
551723	Pengembalian Belanja Subsidi Bunga KOP
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Bunga KOP (Mata Anggaran 551323)
551724	Pengembalian Belanja Subsidi Bunga KOP PRIM
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Bunga KOP PRIM (Mata Anggaran 551324)
551725	Pengembalian Belanja Subsidi Bunga KPR
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Bunga KPR (Mata Anggaran 551325)
551726	Pengembalian Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (Mata Anggaran 551326)
551729	Pengembalian Belanja Subsidi Bunga kredit program lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Bunga kredit program lainnya (Mata Anggaran 551329)
55173	Pengembalian Belanja Subsidi Non-BBM - Pajak
551731	Pengembalian Belanja Subsidi PPh
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi PPh (Mata Anggaran 551331)
551732	Pengembalian Belanja Subsidi PPN
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi PPN (Mata Anggaran 551332)
551733	Pengembalian Belanja Subsidi BM
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi BM (Mata Anggaran 551333)
55174	Pengembalian Belanja Subsidi Non-BBM - Lainnya
551741	Pengembalian Belanja Subsidi haji
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi haji (Mata Anggaran 551341)
551742	Pengembalian Belanja Subsidi kendaraan bermotor
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi kendaraan bermotor (Mata Anggaran 551342)
551749	Pengembalian Belanja Subsidi lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi lainnya (Mata Anggaran 551349)
5518	Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Non-Kuangan - PSO
55181	Pengembalian Belanja Subsidi dalam rangka PSO
551811	Pengembalian Belanja Subsidi PT KAI
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi PT KAI (Mata Anggaran 551411)
551812	Pengembalian Belanja Subsidi PT PELNI
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi PT PELNI (Mata Anggaran 551412)
551813	Pengembalian Belanja Subsidi PT Pos dan Giro

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi PT Pos dan Giro (Mata Anggaran 551413)
551814	Pengembalian Belanja Subsidi TVRI
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi TVRI (Mata Anggaran 551414)
551815	Pengembalian Belanja Subsidi BULOG
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi BULOG (Mata Anggaran 551415)
551819	Pengembalian Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya (Mata Anggaran 551419)
552	Belanja Subsidi Perusahaan Swasta
5521	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55211	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
552111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan - Perusahaan Swasta
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada lembaga keuangan
5522	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan
55221	Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan
552211	Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada lembaga non keuangan
5523	Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55231	Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
552311	Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Keuangan - Perusahaan Swasta
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Lembaga Keuangan - Perusahaan Swasta (Mata Anggaran 552111)
5524	Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan
55241	Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan
552411	Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan (Mata Anggaran 552211)
56	Belanja Hibah
561	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
5611	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
56111	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
561111	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.
5612	Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
56121	Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
561211	Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri (Mata Anggaran 561111)
562	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
5621	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
56211	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
562111	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi internasional.
5622	Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
56221	Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
562211	Pengembalian Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
	Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional (Mata Anggaran 562111)
563	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
5631	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
56311	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
563111	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada pemerintah daaerah.
5632	Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

56321	Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
563211	Pengembalian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
	Merupakan kontra pos dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah (Mata Anggaran 563111)
57	Belanja Bantuan sosial
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga, guna melindungi dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.
571	Belanja Bantuan kompensasi sosial
5711	Belanja Bantuan kompensasi sosial
57111	Belanja Bantuan kompensasi sosial
571111	Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi yang diberikan kepada masyarakat akibat kenaikan harga BBM
5712	Pengembalian Belanja Bantuan kompensasi sosial
57121	Pengembalian Belanja Bantuan kompensasi sosial
571211	Pengembalian Belanja Bantuan kompensasi sosial
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM (Mata Anggaran 571111)
572	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan dan Peribadatan
5721	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan
57211	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan
572111	Belanja Bantuan langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk bantuan langsung (Block Grant) sekolah/lembaga/guru
572112	Belanja Bantuan imbal swadaya Sekolah/Lembaga
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk bantuan imbal swadaya sekolah/lembaga
572113	Belanja Bantuan Beasiswa
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk bantuan beasiswa
5722	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
57221	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
572211	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga, guna meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan
5723	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan
57231	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan
572311	Pengembalian Belanja Bantuan langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bantuan langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru (Mata Anggaran 572111)
572312	Pengembalian Belanja Bantuan imbal swadaya Sekolah/Lembaga
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bantuan imbal swadaya Sekolah/Lembaga (Mata Anggaran 572112)
572313	Pengembalian Belanja Bantuan Beasiswa
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bantuan Beasiswa (Mata Anggaran 572113)
5724	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
57241	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
572411	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan (Mata Anggaran 572211)
573	Belanja Lembaga Sosial Lainnya
5731	Belanja Lembaga Sosial Lainnya
57311	Belanja Lembaga Sosial Lainnya
573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran negara kepada lembaga sosial lainnya
5732	Pengembalian Belanja Lembaga Sosial Lainnya
57321	Pengembalian Belanja Lembaga Sosial Lainnya
573211	Pengembalian Belanja Lembaga Sosial Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Lembaga Sosial Lainnya (Mata Anggaran 573119)
58	Belanja Lain-lain

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

581	Belanja Lain-lain
5811	Belanja Lain-lain
	Digunakan untuk pengeluaran atau belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, belanja sosial dan dana cadangan umum.
58111	Belanja Lain-lain I
581111	Belanja Kerjasama Teknis Internasional
	Digunakan untuk pembayaran iuran-iuran keanggotaan RI dalam berbagai organisasi/ Badan Internasional.
581112	Belanja Pengeluaran Tak Tersangka
	Digunakan untuk pengeluaran yang tidak terduga dan tidak tertampung di dalam pos-pos pengeluaran yang lain.
581113	Belanja Cadangan Umum
	Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka membentuk dana cadangan umum
581114	Belanja Pemilu/oyalt tahunan
	Digunakan untuk pengeluaran pembiayaan kegiatan dalam rangka pemilu/sidang tahunan
581115	Belanja Pengembalian pajak/PE berdasar SKO
	Digunakan untuk pengeluaran atas kelebihan pajak/PE berdasar SKO
581116	Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TNI/Polri
	Digunakan untuk pembayaran selisih harga beras PNS/TNI/POLRI bila terjadi kenaikan pembelian harga beras Pemerintah kepada BULOG
581117	Belanja Cadangan dana reboisasi
	Digunakan untuk pengeluaran pembiayaan kegiatan dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana kehutanan.
581118	Belanja Tunggakan dan klaim pihak ketiga
	Digunakan untuk pembayaran terhadap klaim dari pihak ketiga
581119	Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)
	Digunakan untuk pengeluaran yang sifatnya darurat BA 69
58112	Belanja Lain-lain II
581121	Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB sebesar 9 persen bagian biaya pemungutan dan disalurkan ke Rekening Kas Negara dan Kas daerah.
581122	Belanja KONI
	Bantuan Rutin kepada KONI Pusat dalam rangka tugas rutin KONI.
581123	Belanja Dana Penunjang (PHLN) yang dialokasikan untuk Pemda
	Digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pemda bersumber dari PHLN, Sesuai dengan KMK No. 35 Tahun 2002 tentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan PHLN kepada Pemda .
581124	Belanja Non Modal-Otorita Batam
	Pengeluaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan otorita batam yang bersumber dari rupiah murni .
581129	Belanja lain-lain II lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran belanja lainnya
58113	Belanja Rekonstruksi Aceh
581131	Belanja untuk Rekonstruksi Aceh
	Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias
5812	Pengembalian Belanja Lain-lain
58121	Pengembalian Belanja Lain-lain I
581211	Pengembalian Belanja Kerjasama Teknis Internasional
	Merupakan kontra pos dari Belanja Kerjasama Teknis Internasional (Mata Anggaran 581111)
581212	Pengembalian Belanja Pengeluaran Tak Tersangka
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran Tak Tersangka (Mata Anggaran 581112)

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

581213	Pengembalian Belanja Cadangan Umum
	Merupakan kontra pos dari Belanja Cadangan Umum (Mata Anggaran 581113)
581214	Pengembalian Belanja Pemilu/sidang tahunan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pemilu/oyalt tahunan (Mata Anggaran 581114)
581215	Pengembalian Belanja Pengembalian pajak/PE berdasar SKO
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengembalian pajak/PE berdasar SKO (Mata Anggaran 581115)
581216	Pengembalian Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TNI/Polri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TNI/Polri (Mata Anggaran 581116)
581217	Pengembalian Belanja Cadangan dana reboisasi
	Merupakan kontra pos dari Belanja Cadangan dana reboisasi (Mata Anggaran 581117)
581218	Pengembalian Belanja Tunggakan dan klaim pihak ketiga
	Merupakan kontra pos dari Belanja Tunggakan dan klaim pihak ketiga (Mata Anggaran 581118)
581219	Pengembalian Belanja lain-lain I lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi) (Mata Anggaran 581119)
58122	Pengembalian Belanja Lain-lain II
581221	Pengembalian Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP (Mata Anggaran 581121)
581222	Pengembalian Belanja KONI
	Merupakan kontra pos dari Belanja KONI (Mata Anggaran 581122)
581223	Pengembalian Belanja Dana Penunjang (PHLN) yang dialokasikan untuk Pemda
	Merupakan kontra pos dari Belanja Dana Penunjang (PHLN) yang dialokasikan untuk Pemda (Mata Anggaran 581123)
581224	Pengembalian Belanja Non Modal-Otorita Batam
	Merupakan kontra pos dari Belanja Non Modal-Otorita Batam (Mata Anggaran 581124)
581229	Pengembalian Belanja Lain-lain II lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja lain-lain II lainnya (Mata Anggaran 581129)
58123	Belanja Rekonstruksi Aceh
581231	Pengembalian Belanja untuk Rekonstruksi Aceh
	Kontra Pos dari Belanja Rekonstruksi Aceh (581131)
6	BELANJA UNTUK DAERAH
	Semua pengeluaran negara untuk membiayai dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.
61	Belanja Dana Perimbangan
	semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam
	Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
611	Belanja Dana Bagi Hasil
	Digunakan untuk pengeluaran negara yang dialokasikan kepada bagian daerah atas penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta bagian daerah atas Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
6111	Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan
61111	Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan
611111	Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi
	Pengeluaran negara atas penyaluran penerimaan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian pendapatan Propinsi.
611112	Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran negara atas penyaluran penerimaan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian pendapatan Kabupaten/Kota.

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

611113	Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi
	Pengeluaran negara atas penyaluran penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yang merupakan bagian pendapatan Propinsi.
611114	Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran negara atas penyaluran penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yang merupakan bagian pendapatan Kabupaten/Kota.
61112	Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
611121	Belanja Bagi hasil PBB untuk Propinsi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian propinsi sebesar 16,2 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
611122	Belanja Bagi hasil PBB untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian Kabupaten/Kota sebesar 64,8 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
611123	Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian daerah untuk Biaya Pemungutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
611124	Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kab./Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian daerah untuk Biaya Pemungutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
611125	Belanja PBB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat dan dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota, yang pengalokasiannya didasarkan atas realisasi penerimaan PBB Tahun Anggaran Berjalan.
61113	Belanja Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
611131	Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Propinsi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian propinsi sebesar 16 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
611132	Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian daerah Kabupaten/Kota sebesar 64 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
611133	Belanja BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat dan dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota secara merata.
611134	Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat dibagikan untuk Perbaikan Administrasi Pertanahan
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat yang digunakan untuk Biaya Perbaikan Administrasi Pertanahan.
611135	Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk biaya Adm.Pengkt.Pel. BPHTB
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat yang digunakan untuk Biaya Administrasi Peningkatan Pelayanan BPHTB.
611136	Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk Pemberian Imbalan Bunga
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat yang digunakan untuk Pemberian Imbalan Bunga.
6112	Belanja Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
61121	Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi
611211	Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Propinsi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Propinsi.
611212	Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota Penghasil
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil.
611213	Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota lainnya
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi penghasil.

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

61122	Belanja Dana Bagi Hasil Gas Alam
611221	Belanja Bagi hasil gas alam untuk Propinsi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Propinsi penghasil.
611222	Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota Penghasil
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil.
611223	Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota lainnya
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi penghasil.
61123	Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum
611231	Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Propinsi
	Menyalurkan bagi hasil Iuran Tetap sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil
611232	Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Kab./Kota
	Menyalurkan bagi hasil Iuran Tetap sebesar 64 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil
611233	Belanja Bagi hasil royalti untuk Propinsi
	Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil
611234	Belanja Bagi hasil royalti untuk Kab./Kota Penghasil
	Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil
611235	Belanja Bagi hasil royalti untuk Kab./Kota lainnya
	Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil
61124	Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan
611241	Belanja Bagi hasil IHPH untuk Propinsi
	Menyalurkan bagi hasil IHPH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil
611242	Belanja Bagi hasil IHPH untuk Kab./Kota
	Menyalurkan bagi hasil IHPH sebesar 64% kepada Kabupaten/Kota Penghasil
611243	Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi
	Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil
611244	Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil
	Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil
611245	Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya
	Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil
61125	Belanja Dana bagi Hasil Perikanan
611251	Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi
	Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 20% secara merata kepada Propinsi di seluruh Indonesia
611252	Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota
	Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
6113	Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan
61131	Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan
611311	Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh ps1 21 untuk Propinsi
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh ps1 21 untuk Propinsi (Mata Anggaran 611111)
611312	Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh ps1 21 untuk Kabupaten/Kota
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh ps1 21 untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 611112)
611313	Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh ps1 25/29 OP untuk Propinsi
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh ps1 25/29 OP untuk Propinsi (Mata Anggaran 611113)
611314	Pengembalian Belanja Bagi hasil PPh ps1 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PPh ps1 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 611114)

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

61132	Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
611321	Pengembalian Belanja Bagi hasil PBB untuk Propinsi
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PBB untuk Propinsi (Mata Anggaran 611121)
611322	Pengembalian Belanja Bagi hasil PBB untuk Kabupaten/Kota
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PBB untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 611122)
611323	Pengembalian Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi (Mata Anggaran 611123)
611324	Pengembalian Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kab./Kota
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611124)
611325	Pengembalian Belanja PBB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota
	Merupakan kontra pos dari Belanja PBB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 611125)
61133	Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
611331	Pengembalian Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Propinsi
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Propinsi (Mata Anggaran 611131)
611332	Pengembalian Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Kabupaten/Kota
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 611132)
611333	Pengembalian Belanja BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota
	Merupakan kontra pos dari Belanja BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 611133)
611334	Pengembalian Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat dibagikan untuk Perbaikan Administrasi Pertanahan
	Merupakan kontra pos dari Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat dibagikan untuk Perbaikan Administrasi Pertanahan (Mata Anggaran 611134)
611335	Pengembalian Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk biaya Adm.Pengkt.Pel. BPHTB
	Merupakan kontra pos dari Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk biaya Adm.Pengkt.Pel. BPHTB (Mata Anggaran 611135)
611336	Pengembalian Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk Pemberian Imbalan Bunga
	Merupakan kontra pos dari Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk Pemberian Imbalan Bunga (Mata Anggaran 611136)
6114	Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
61141	Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi
611411	Pengembalian Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Propinsi
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Propinsi (Mata Anggaran 611211)
611412	Pengembalian Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota Penghasil
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611212)
611419	Pengembalian Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611213)
61142	Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Belanja Gas Alam
611421	Pengembalian Belanja Bagi hasil gas alam untuk Propinsi
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil gas alam untuk Propinsi (Mata Anggaran 611221)
611422	Pengembalian Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota Penghasil
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611222)
611429	Pengembalian Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611223)
61143	Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum
611431	Pengembalian Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Propinsi

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Propinsi (Mata Anggaran 611231)
611432	Pengembalian Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Kab./Kota
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611232)
611433	Pengembalian Belanja Bagi hasil oyalty untuk Propinsi
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil royalti untuk Propinsi (Mata Anggaran 611233)
611434	Pengembalian Belanja Bagi hasil oyalty untuk Kab./Kota Penghasil
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil oyalty untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611234)
611439	Pengembalian Belanja Bagi hasil oyalty untuk Kab./Kota lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil oyalty untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611235)
61144	Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan
611441	Pengembalian Belanja Bagi hasil IHPH untuk Propinsi
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil IHPH untuk Propinsi (Mata Anggaran 611241)
611442	Pengembalian Belanja Bagi hasil IHPH untuk Kab./Kota
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil IHPH untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611242)
611443	Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi (Mata Anggaran 611243)
611444	Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil (Mata Anggaran 611244)
611449	Pengembalian Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya (Mata Anggaran 611245)
61145	Pengembalian Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan
611451	Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Propinsi (Mata Anggaran 611251)
611452	Pengembalian Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota
	Merupakan kontra pos dari Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota (Mata Anggaran 611252)
612	Belanja Dana Alokasi Umum
6121	Belanja Dana Alokasi Umum
61211	Belanja Dana Alokasi Umum
612111	Belanja DAU untuk Propinsi
	Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Propinsi.
612112	Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Kabupaten/Kota.
6122	Pengembalian Dana Alokasi Umum
61221	Pengembalian Dana Alokasi Umum
612211	Pengembalian DAU untuk Propinsi
	Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Propinsi (Mata Anggaran 612111)
612212	Pengembalian DAU untuk Kabupaten/Kota
	Merupakan kontra pos dari Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota (Mata Anggaran 612112)
613	Belanja Dana Alokasi Khusus
6131	Belanja DAK Dana Reboisasi
61311	Belanja DAK Dana Reboisasi
613111	Belanja DAK DR untuk DaerahPenghasil
	Pengeluaran DAK yang bersumber dari dana reboisasi dan digunakan untuk kegiatan reboisasi di daerah penghasil.
6132	Belanja DAK Non-Dana Reboisasi
61321	Belanja DAK Non DR Pendidikan
613211	Belanja DAK Non DR untuk Pendidikan
	Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan non-reboisasi tapi digunakan untuk kegiatan pendidikan

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

61322	Belanja DAK Non DR Kesehatan
613221	Belanja DAK Non DR untuk Kesehatan
	Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan non-reboisasi tapi digunakan untuk kegiatan kesehatan
61323	Belanja DAK Non DR Infrastruktur
613231	Belanja DAK Non DR untuk Infrastruktur
	Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan non-reboisasi tapi digunakan untuk kegiatan infrastruktur.
61324	Belanja DAK Non DR Pemekaran Daerah (Pemerintahan)
613241	Belanja DAK Non DR untuk Pemekaran Pemerintah
	Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan non-reboisasi tapi digunakan untuk kegiatan pemekaran pemerintah
61325	Belanja DAK Non DR Kelautan dan Perikanan
613251	Belanja DAK Non DR untuk Kelautan dan Perikanan
	Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan non-reboisasi tapi digunakan untuk kegiatan kelautan dan perikanan
61326	Belanja DAK Non DR Pertanian
613261	Belanja DAK Non DR untuk Pertanian
	Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan non-reboisasi tapi digunakan untuk kegiatan pertanian
61327	Belanja DAK Non DR Lingkungan Hidup
613271	Belanja DAK Non DR untuk Lingkungan Hidup
	Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan non-reboisasi tapi digunakan untuk kegiatan Lingkungan Hidup
6133	Pengembalian DAK Dana Reboisasi
61331	Pengembalian DAK Dana Reboisasi
613311	Pengembalian DAK DR untuk Daerah Penghasil
	Merupakan kontra pos dari Belanja DAK DR untuk DaerahPenghasil (Mata Anggaran 613111)
6134	Pengembalian DAK Non-Dana Reboisasi
61341	Pengembalian Pendidikan DAK Non DR Pendidikan
613411	Pengembalian DAK Non DR untuk Pendidikan
	Merupakan kontra pos dari Belanja DAK Non DR untuk Pendidikan (Mata Anggaran 613211)
61342	Pengembalian DAK Non DR Kesehatan
613421	Pengembalian DAK Non DR untuk Kesehatan
	Merupakan kontra pos dari Belanja DAK Non DR untuk Kesehatan (Mata Anggaran 613221)
61343	Pengembalian DAK Non DR Infrastruktur
613431	Pengembalian DAK Non DR untuk Infrastruktur
	Merupakan kontra pos dari Belanja DAK Non DR untuk Infrastruktur (Mata Anggaran 613231)
61344	Pengembalian DAK Non DR Pemekaran Pemerintah
613441	Pengembalian DAK Non DR untuk Pemekaran Pemerintah
	Merupakan kontra pos dari Belanja DAK Non DR untuk Pemekaran Pemerintah (Mata Anggaran 613241)
61345	Pengembalian DAK Non DR Kelautan dan Perikanan
613451	Pengembalian DAK Non DR untuk Kelautan dan Perikanan
	Merupakan kontra pos dari Belanja DAK Non DR untuk Kelautan dan Perikanan (Mata Anggaran 613251)
61346	Pengembalian Belanja DAK Non DR Pertanian
613461	Pengembalian Belanja DAK Non DR untuk Pertanian
	Merupakan kontra pos dari Belanja DAK Non DR untuk Pertanian (Mata Anggaran 613261)
61347	Pengembalian Belanja DAK Non DR Lingkungan Hidup
613471	Pengembalian Belanja DAK Non DR untuk Lingkungan Hidup
	Merupakan kontra pos dari Belanja DAK Non DR untuk Lingkungan Hidup (Mata Anggaran 613271)
62	Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
621	Belanja Dana Otonomi Khusus
6211	Belanja Dana Otonomi Khusus
62111	Belanja Dana Otonomi Khusus

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

621111	Belanja Dana Otonomi Khusus untuk Papua
	Pengeluaran untuk pelaksanaan otonomi khusus untuk papua, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001
621119	Belanja Dana Otonomi Khusus Lainnya
	Pengeluaran untuk pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, serta untuk membiayai pos anggaran tertentu dalam belanja daerah apabila ada kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada pos anggaran tersebut (selain papua).
6212	Pengembalian Dana Otonomi Khusus
62121	Pengembalian Dana Otonomi Khusus
621211	Pengembalian Dana Otonomi Khusus untuk Papua
	Merupakan kontra pos dari Belanja Dana Otonomi Khusus untuk Papua (Mata Anggaran 621111)
621219	Pengembalian Dana Otonomi Khusus Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Belanja Dana Otonomi Khusus Lainnya (Mata Anggaran 621119)
622	Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang
6221	Belanja Murni
62211	Belanja Murni
622111	Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Propinsi Murni
	Pengeluaran dana penyesuaian, pelaksanaan pencairannya menggunakan Bagian anggaran 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang) untuk Propinsi Murni
622112	Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Kabupaten/Kota Murni
	Pengeluaran dana penyesuaian, pelaksanaan pencairannya menggunakan Bagian anggaran 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang) untuk Kabupaten/Kota Murni.
6222	Belanja Ad hoc
62221	Belanja Ad hoc
622211	Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Propinsi Ad hoc
	Pengeluaran dana penyesuaian, pelaksanaan pencairannya menggunakan Bagian anggaran 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang) untuk Propinsi Ad hoc
622212	Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Kabupaten/Kota Ad hoc
	Pengeluaran dana penyesuaian, pelaksanaan pencairannya menggunakan Bagian anggaran 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang) untuk Kabupaten/Kota Ad hoc.
6223	Pengembalian Murni
62231	Pengembalian Murni
622311	Pengembalian Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Propinsi Murni
	Merupakan kontra pos dari Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Propinsi Murni (Mata Anggaran 622111)
622312	Pengembalian Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Kabupaten/Kota Murni
	Merupakan kontra pos dari Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Kabupaten/Kota Murni (Mata Anggaran 622112)
6224	Pengembalian Ad hoc
62241	Pengembalian Ad hoc
622411	Pengembalian Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Propinsi Ad hoc
	Merupakan kontra pos dari Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Propinsi Ad hoc (Mata Anggaran 622211)
622412	Pengembalian Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Kabupaten/Kota Ad hoc
	Merupakan kontra pos dari Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Kabupaten/Kota Ad hoc (Mata Anggaran 622212)
7	PEMBIAYAAN
71	Penerimaan Pembiayaan
711	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
7111	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
71111	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
	Penerimaan yang berasal dari pinjaman pemerintah pusat dari Bank dalam negeri.
711111	Penerimaan Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari Sektor Perbankan
	Penerimaan yang bersumber dari Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari bank-bank dalam negeri untuk menutup kekurangan dana dalam jangka pendek, dan jatuh tempo dalam periode yang tidak lebih dari satu tahun. (konfirmasi ke Dir PKN)

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

711112	Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan
	Penerimaan pinjaman dari Bank dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun.
711113	Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)
	Penerimaan dari Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun sebelumnya dan besar penggunaan dalam pembiayaan dengan sepengetahuan DPR.
71112	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan dana moratorium
711121	Penerimaan Pembiayaan dari dana eks moratorium pokok untuk Cadangan Aceh
	Penerimaan dari cadangan moratorium Aceh
7112	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan
71121	Penerimaan Hasil Privatisasi
711211	Penerimaan Hasil Privatisasi
	Penerimaan dari hasil penjualan saham.
7113	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
71131	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
711311	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
	Penerimaan dari penjualan aset restrukturisasi perbankan/pengembalian dana talangan dari BPPN
7114	Penerimaan Surat Utang Negara/Obligasi
71141	Penerimaan Obligasi Dalam Negeri – Jangka Pendek
711411	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Obligasi DN – Jangka Pendek
	MAP 711411 mengimbangi MAK 721312. Karena tidak ada penerimaan, MAP ini digunakan hanya untuk memungkinkan pelaporan terhadap utang yang dijadualkan kembali .
711412	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi DN – Jangka Pendek
	Penerimaan dari penerbitan/penjualan obligasi dlm negeri yg jatuh tempo dlm periode tidak lebih dari satu tahun.
711413	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri Jangka Pendek
	Penerimaan bunga obligasi dalam negeri jangka pendek dari obligor (pembeli obligasi pemerintah) yang diterima pada saat penjualan obligasi dan akan dibayarkan kembali kepada obligor pada saat jatuh tempo bunga obligasi (accrued interest).
71142	Penerimaan Obligasi Dalam Negeri - Jangka Panjang
711421	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Obligasi DN – Jangka Panjang
	Penerimaan dari penjadualan kembali obligasi dalam negeri jangka panjang. Karena tidak ada penerimaan sesungguhnya, MAK ini digunakan hanya untuk memungkinkan pelaporan terhadap utang yang dijadualkan kembali.
711422	Penerimaan Pelunasan Investasi dari Obligasi – Jangka Panjang
	Penerimaan dari Investasi atas obligasi yang sudah dibayar kembali oleh penerbit obligasi (issuer).
711423	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri Jangka Panjang
	Penerimaan bunga obligasi dalam negeri jangka panjang dari obligor yang diterima pada saat penjualan obligasi dan akan dibayarkan kembali kepada obligor pada saat jatuh tempo bunga obligasi.
711424	Penerimaan Pembiayaan untuk Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang
	Penerimaan dari penerbitan/penjualan obligasi dalam negeri yang jatuh tempo dalam periode lebih dari satu tahun.
71143	Penerimaan Obligasi Luar Negeri
711431	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi LN
	Penerimaan dari penerbitan atau penjualan obligasi Negara di bursa luar negeri.
711432	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara LN
	Penerimaan bunga obligasi luar negeri dari obligor yang diterima pada saat penjualan obligasi dan akan dibayarkan kembali kepada obligor pada saat jatuh tempo bunga obligasi.
71144	Penerimaan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Pendek
711441	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek
	Penerimaan dari penerbitan/penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN yang jatuh tempo dalam periode kurang dari satu tahun.
711442	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

	Penerimaan dari penjadualan kembali Surat Utang Perbendaharaan DN Jangka Pendek. Karena tidak ada penerimaan sesungguhnya, MAK ini digunakan hanya untuk memungkinkan pelaporan terhadap surat utang perbendaharaan DN yang dijadualkan kembali.
71145	Penerimaan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Panjang
711451	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Panjang
	Penerimaan dari penerbitan/penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN yang jatuh tempo dalam periode lebih dari satu tahun.
711452	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Panjang
	Penerimaan dari penjadualan kembali Surat Utang Perbendaharaan DN Jangka Panjang. Karena tidak ada penerimaan sesungguhnya, MAK ini digunakan hanya untuk memungkinkan pelaporan terhadap surat utang perbendaharaan DN yang dijadualkan kembali. MAP 711452 mengimbangi MAK 721342.
7115	Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
71151	Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
711511	Pengembalian Penerimaan Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari Sektor Perbankan
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari Sektor Perbankan (Mata Anggaran 711111)
711512	Pengembalian Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan (Mata Anggaran 711112)
711513	Pengembalian Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) (Mata Anggaran 711113)
71152	Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Dana Moratorium
711521	Pengembalian Penerimaan Pembiayaan dari dana eks moratorium untuk Cadangan Aceh
	Merupakan kontra pos dari penerimaan pembiayaan dari dana eks moratorium untuk Cadangan Aceh
7116	Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan
71161	Pengembalian Penerimaan Hasil Privatisasi
711611	Pengembalian Penerimaan Hasil Privatisasi
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Hasil Privatisasi (Mata Anggaran 711211)
7117	Pengembalian Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
71171	Pengembalian Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
711711	Pengembalian Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi (Mata Anggaran 711311)
7118	Pengembalian Penerimaan Surat Utang Negara/Obligasi
71181	Pengembalian Penerimaan Obligasi Dalam Negeri - Jangka Pendek
711811	Pengembalian Penerimaan dari Penjadualan Kembali Obligasi DN – Jangka Pendek
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan dari Penjadualan Kembali Obligasi DN – Jangka Pendek (Mata Anggaran 711411)
711812	Pengembalian Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi DN – Jangka Pendek
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi DN – Jangka Pendek (Mata Anggaran 711412)
711813	Pengembalian Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri Jangka Pendek
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri Jangka Pendek (Mata Anggaran 711413)
71182	Pengembalian Penerimaan Obligasi Dalam Negeri - Jangka Panjang
711821	Pengembalian Penerimaan dari Penjadualan Kembali Obligasi DN – Jangka Panjang
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan dari Penjadualan Kembali Obligasi DN – Jangka Panjang (Mata Anggaran 711421)
711822	Pengembalian Penerimaan Pelunasan Investasi dari Obligasi – Jangka Panjang
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Pelunasan Investasi dari Obligasi – Jangka Panjang (Mata Anggaran 711422)
711823	Pengembalian Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri Jangka Panjang
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri Jangka Panjang (Mata Anggaran 711423)
711824	Pengembalian Penerimaan Pembiayaan untuk Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Pembiayaan untuk Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang (Mata Anggaran

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

	711424)
71183	Pengembalian Penerimaan Obligasi Luar Negeri
711831	Pengembalian Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi LN
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi LN (Mata Anggaran 711431)
711832	Pengembalian Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara LN
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara LN (Mata Anggaran 711432)
71184	Pengembalian Penerimaan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Pendek
711841	Pengembalian Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek (Mata Anggaran 711441)
711842	Pengembalian Penerimaan dari Penjadualan Kembali Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan dari Penjadualan Kembali Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek (Mata Anggaran 711442)
71185	Pengembalian Penerimaan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Panjang
711851	Pengembalian Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Panjang
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Panjang (Mata Anggaran 711451)
711852	Pengembalian Penerimaan dari Penjadualan Kembali Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Panjang
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan dari Penjadualan Kembali Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Panjang (Mata Anggaran 711452)
712	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri
7121	Penarikan Pinjaman Program
71211	Penarikan Pinjaman Program Bilateral
712111	Penarikan Pinjaman Program dari OECF
	Penerimaan pinjaman program dari negara pemberi pinjaman, yaitu Jepang.
712112	Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya
	Penerimaan pinjaman program dari negara pemberi pinjaman selain Jepang.
71212	Penarikan Pinjaman Program Multilateral
712121	Penarikan Pinjaman Program dari IBRD
	Penerimaan pinjaman program dari lembaga/badan internasional IBRD.
712122	Penarikan Pinjaman Program dari ADB
	Penerimaan pinjaman program dari lembaga/badan internasional ADB.
712123	Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya
	Penerimaan pinjaman program dari lembaga/badan internasional lainnya selain IBRD dan ADB.
7122	Penarikan Pinjaman Proyek
71221	Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral
712211	Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral
	Penerimaan pinjaman proyek dari Pemerintah suatu negara melalui lembaga/ badan keuangan yang dibentuk oleh negara bersangkutan untuk mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian pinjaman/hibah kepada negara-negara penerima.
71222	Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral
712221	Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral
	Penerimaan pinjaman proyek dari lembaga/badan internasional seperti IBRD, ADB, IDA, IFAD dll.
71223	Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor
712231	Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor
	Penerimaan dari pinjaman proyek yang disediakan dan dijamin oleh suatu negara melalui lembaga pengembang ekspornya kepada Pemerintah Indonesia untuk pembelian barang modal dan atau jasa dari negara pemberi pinjaman untuk keperluan proyek-proyek Pemerintah.
71224	Penarikan Pinjaman Proyek Leasing

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

712241	Penarikan Pinjaman Proyek Leasing
	Penerimaan dari pinjaman proyek yg diberikan kpd Pemerintah utk membiayai pembelian barang dan atau jasa dgn cara angsuran dari suatu perusahaan leasing di luar negeri berdasarkan KJB antara proyek dan pemasok.
71225	Penarikan Pinjaman Proyek Komersial
712251	Penarikan Pinjaman Proyek Komersial
	Penerimaan dari pinjaman dengan persyaratan komersial yang dananya diterima secara tunai dengan tujuan untuk keperluan Pemerintah lainnya.
71229	Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya
712291	Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya
	Penerimaan pinjaman luar negeri yang tidak termasuk dalam klasifikasi penerimaan pinjaman yang lain.
7123	Pengembalian Penarikan Pinjaman Program
71231	Pengembalian Penarikan Pinjaman Program Bilateral
712311	Pengembalian Penarikan Pinjaman Program dari OECF
	Merupakan kontra pos dari Penarikan Pinjaman Program dari OECF (Mata Anggaran 712111)
712312	Pengembalian Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya (Mata Anggaran 712112)
71232	Pengembalian Penarikan Pinjaman Program Multilateral
712321	Pengembalian Penarikan Pinjaman Program dari IBRD
	Merupakan kontra pos dari Penarikan Pinjaman Program dari IBRD (Mata Anggaran 712121)
712322	Pengembalian Penarikan Pinjaman Program dari ADB
	Merupakan kontra pos dari Penarikan Pinjaman Program dari ADB (Mata Anggaran 712122)
712323	Pengembalian Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya (Mata Anggaran 712123)
7124	Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek
71241	Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral
712411	Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral
	Merupakan kontra pos dari Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral (Mata Anggaran 712211)
71242	Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral
712421	Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral
	Merupakan kontra pos dari Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral (Mata Anggaran 712221)
71243	Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor
712431	Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor
	Merupakan kontra pos dari Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor (Mata Anggaran 712231)
71244	Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Leasing
712441	Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Leasing
	Merupakan kontra pos dari Penarikan Pinjaman Proyek Leasing (Mata Anggaran 712241)
71245	Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Komersial
712451	Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Komersial
	Merupakan kontra pos dari Penarikan Pinjaman Proyek Komersial (Mata Anggaran 712251)
71249	Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya
712491	Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya (Mata Anggaran 712291)
713	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
7131	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
71311	Penerimaan Pinjaman Program
713111	Penerimaan Pinjaman Program dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
	Penerimaan dari penjadualan kembali pokok utang luar negeri dari pinjaman program. MAP 1351/713111 mengimbangi MAK 6351/723111.
71312	Penerimaan Pinjaman Proyek

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

713121	Penerimaan Pinjaman Proyek dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
	Penerimaan dari penjadualan kembali pokok utang luar negeri dari pinjaman proyek. MAP 1352/713121 mengimbangi MAK 6352/723211.
7132	Pengembalian Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
71321	Pengembalian Penerimaan Pinjaman Program
713211	Pengembalian Penerimaan Pinjaman Program dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Pinjaman Program dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri (Mata Anggaran 713111)
71322	Pengembalian Penerimaan Pinjaman Proyek
713221	Pengembalian Penerimaan Pinjaman Proyek dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Pinjaman Proyek dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri (Mata Anggaran 713121)
714	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
7141	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
71411	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Pinjaman Luar Negeri
714111	Penerimaan Pembiayaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
	Penerimaan dari penjadualan kembali bunga utang luar negeri. Karena tidak ada penerimaan sesungguhnya, MAP ini digunakan hanya untuk memungkinkan pelaporan terhadap utang yang dijadualkan kembali. MAP 1353/714111 mengimbangi MAK 5711/723311.
7142	Pengembalian Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
71421	Pengembalian Penerimaan Penjadulan Kembali Bunga Utang Pinjaman Luar Negeri
714211	Pengembalian Penerimaan Pembiayaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Pembiayaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri (Mata Anggaran 714111)
715	Penerimaan Pembiayaan Lain-lain
7151	Penerimaan Pembiayaan Lain-lain
71511	Penerimaan Pembiayaan Lain-lain
715111	Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs
	.
715112	Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP)
	Penerimaan dari dana anggaran pembangunan yang sudah dicadangkan sebelumnya.
7152	Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Lain-lain
71521	Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Lain-lain
715211	Koreksi Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs
	Merupakan kontra pos dari Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs (Mata Anggaran 715111)
715212	Koreksi Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP)
	Merupakan kontra pos dari Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) (Mata Anggaran 715112)
72	Pengeluaran Pembiayaan
721	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri
7211	Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
72111	Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
721111	Belanja Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan
	Pembayaran Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari bank-bank dalam negeri. (konfirmasi ke Dir PKN)
721112	Belanja Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan
	Pembayaran pinjaman kepada Bank dalam negeri. (confirm ke DPKN)
72112	Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan untuk Moratorium
721121	Belanja Pengeluaran Pembiayaan Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh
	Pengeluaran pembiayaan yang berasal dari Eks Moratorium untuk Cadangan Aceh
7212	Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan
72121	Belanja Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi
721211	Belanja Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi
	Pengeluaran untuk pembiayaan program restrukturisasi perbankan/dana talangan kepada BPPN

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

7213	Belanja Pengeluaran Surat Utang Negara/Obligasi
72131	Belanja Pengeluaran Obligasi Dalam Negeri - Jangka Pendek
721311	Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Pendek
	Pelunasan/pembayaran kembali obligasi dalam negeri jangka pendek (yang diterima dari MAP 711412).
721312	Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Pendek melalui Penjadualan Kembali
	Pengeluaran berkaitan dengan penjadualan kembali obligasi dalam negeri jangka pendek. Karena tidak ada pengeluaran sesungguhnya, MAK ini digunakan hanya untuk memungkinkan pelaporan terhadap utang yang dijadualkan kembali.
721313	Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali
	Pengeluaran berkaitan dengan pembelian kembali (buyback) obligasi dalam negeri jangka pendek.
721314	Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri – Jangka Pendek
	Pembayaran bunga obligasi dalam negeri jangka pendek kepada obligor (pembeli obligasi pemerintah) pada saat jatuh tempo bunga obligasi.
72132	Belanja Pengeluaran Obligasi Dalam Negeri - Jangka Panjang
721321	Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Panjang
	Pengeluaran karena pelunasan/pembayaran kembali obligasi dalam negeri jangka panjang (yang diterbitkan dari MAP 711424).
721322	Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Panjang melalui Penjadualan Kembali
	Pelunasan obligasi dalam negeri jangka panjang yang telah dijadualkan kembali.
721323	Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali
	Pengeluaran berkaitan dengan pembelian kembali (buyback) obligasi dalam negeri jangka panjang.
721324	Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri – Jangka Panjang
	Pembayaran bunga obligasi dalam negeri jangka panjang kepada obligor (pembeli obligasi pemerintah) pada saat jatuh tempo bunga obligasi.
72133	Belanja Pengeluaran Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Pendek
721331	Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek
	Pengeluaran untuk pelunasan surat utang perbendaharaan DN jangka pendek.
721332	Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek melalui Penjadualan Kembali
	Pelunasan surat utang perbendaharaan DN jangka pendek yang telah dijadualkan kembali.
721333	Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali
	Pengeluaran berkaitan dengan pembelian kembali (buyback) Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek.
72134	Belanja Pengeluaran Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Panjang
721341	Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Panjang
	Pengeluaran untuk pelunasan surat utang perbendaharaan DN jangka panjang.
721342	Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Panjang melalui Penjadualan Kembali
	Pelunasan surat utang perbendaharaan DN jangka panjang yang telah dijadualkan kembali.
721343	Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali
	Pengeluaran berkaitan dengan pembelian kembali (buyback) Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka panjang.
72135	Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Negara/Obligasi Luar Negeri
721351	Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi Internasional
	Pengeluaran untuk pelunasan Obligasi pemerintah yang diperjualbelikan di Bursa Efek luar negeri.
721352	Belanja Pembelian Kembali Obligasi Negara Luar Negeri
	Pengeluaran berkaitan dengan pembelian kembali (buyback) Obligasi pemerintah yang diperjualbelikan di Bursa Efek luar negeri.
721353	Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Luar Negeri
	Pengeluaran pembayaran bunga Obligasi Negara luar negeri dari pemerintah atas penerimaan bunga yang diterima pada saat penjualan Obligasi Negara luar negeri kepada obligor pada saat jatuh tempo bunga obligasi.
7214	Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

72141	Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
721411	Pengembalian Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan (Mata Anggaran 721111)
721412	Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan (Mata Anggaran 721112)
72142	Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan untuk Moratorium
721421	Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh
	Mrupakan kontra pos Pengeluaran pembiayaan Eks Moratorium untuk Cadangan Aceh
7215	Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan
72151	Pengembalian Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi
721511	Pengembalian Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi (Mata Anggaran 721211)
7216	Pengembalian Pelunasan Surat Utang Negara/Obligasi
72161	Pengembalian Pelunasan Obligasi Dalam Negeri - Jangka Pendek
721611	Pengembalian Pelunasan Obligasi DN – Jangka Pendek
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Pendek (Mata Anggaran 721311)
721612	Pengembalian Pelunasan Obligasi DN – Jangka Pendek melalui Penjadualan Kembali
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Pendek melalui Penjadualan Kembali (Mata Anggaran 721312)
721613	Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali (Mata Anggaran 721313)
721614	Pengembalian Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri – Jangka Pendek
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri – Jangka Pendek (Mata Anggaran 721314)
72162	Pengembalian Obligasi Dalam Negeri - Jangka Panjang
721621	Pengembalian Pelunasan Obligasi DN – Jangka Panjang
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Panjang (Mata Anggaran 721321)
721622	Pengembalian Pelunasan Obligasi DN – Jangka Panjang melalui Penjadualan Kembali
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Panjang melalui Penjadualan Kembali (Mata Anggaran 721322)
721623	Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN – Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali (Mata Anggaran 721323)
721624	Pengembalian Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri – Jangka Panjang
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri – Jangka Panjang (Mata Anggaran 721324)
72163	Pengembalian Pengeluaran Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Pendek
721631	Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek (Mata Anggaran 721331)
721632	Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek melalui Penjadualan Kembali
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek melalui Penjadualan Kembali (Mata Anggaran 721332)
721633	Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN – Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali (Mata Anggaran 721333)
72164	Pengembalian Pengeluaran Obligasi Dalam Negeri - Jangka Panjang

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

721641	Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Obligasi DN – Jangka Panjang
	Merupakan kontra pos dari Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Obligasi DN – Jangka Panjang (721321)
721642	Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Obligasi DN – Jangka Panjang melalui Penjadualan Kembali
	Merupakan kontra pos dari Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Obligasi DN – Jangka Panjang melalui Penjadwalan Kembali (721322)
721643	Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Obligasi DN – Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali
	Merupakan kontra pos dari Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Obligasi DN – Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali (721323)
72165	Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Negara/Obligasi Luar Negeri
721651	Pengembalian Pengeluaran Pelunasan Obligasi Internasional
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi Internasional (Mata Anggaran 721351)
721652	Pengembalian Belanja Pembelian Kembali Obligasi Negara Luar Negeri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembelian Kembali Obligasi Negara Luar Negeri (Mata Anggaran 721352)
721653	Pengembalian Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Luar Negeri
	Merupakan kontra pos dari Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Luar Negeri (Mata Anggaran 721353)
722	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri
7221	Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
72211	Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Program
722111	Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok (Amortisasi) Utang Luar Negeri – Pinjaman Program
	Pembayaran kembali utang luar negeri jangka panjang dari sumber pinjaman program yang jatuh tempo selama tahun anggaran.
722112	Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Program
	Pengeluaran untuk pembayaran/cicilan pokok utang luar negeri dari Pinjaman Program
72212	Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Proyek
722121	Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Proyek
	Pembayaran kembali utang luar negeri jangka panjang dari sumber pinjaman proyek yang jatuh tempo selama tahun anggaran.
722122	Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Proyek
	Pengeluaran untuk cicilan pokok utang luar negeri dari Pinjaman Proyek
7222	Pengembalian Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
72221	Pengembalian Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Program
722211	Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok (Amortisasi) Utang Luar Negeri – Pinjaman Program
	Merupakan kontra pos dari Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok (Amortisasi) Utang Luar Negeri – Pinjaman Program (Mata Anggaran 722111)
722212	Pengembalian Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Program
	Merupakan kontra pos dari Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Program (Mata Anggaran 722112)
72222	Pengembalian Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Proyek
722221	Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Proyek
	Merupakan kontra pos dari Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Proyek (Mata Anggaran 722121)
722222	Pengembalian Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Proyek
	Merupakan kontra pos dari Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Proyek (Mata Anggaran 722122)
723	Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali
	Pengeluaran yang berasal dari penjadualan kembali utang luar-negeri jangka-panjang yang jatuh tempo selama tahun anggaran tetapi tidak dibayar kembali dengan uang. MAK-MAK di bawah sub kelompok ini hanya disediakan untuk memungkinkan pelaporan terhadap ut
7231	Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Program
	Pengeluaran berkaitan dengan penjadualan kembali utang luar negeri dari pinjaman program.
72311	Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

723111	Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program
	Pengeluaran dari penjadualan kembali utang LN – pinjaman program.
7232	Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek
72321	Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek
723211	Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek
7233	Pelunasan Bunga Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek
72331	Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
723311	Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
7234	Pengembalian Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Program
72341	Pengembalian Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program
723411	Pengembalian Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program
	Merupakan kontra pos dari Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program (Mata Anggaran 723111)
7235	Pengembalian Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek
72351	Pengembalian Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek
723511	Pengembalian Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek
	Merupakan kontra pos dari Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek (Mata Anggaran 723211)
7236	Pengembalian Pelunasan Bunga Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek
72361	Pengembalian Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
723611	Pengembalian Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
	Merupakan kontra pos dari Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri (Mata Anggaran 723311)
724	Penyertaan Modal Pemerintah
7241	Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN
72411	Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN
724111	PMP untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
	Penyertaan modal pemerintah pada BUMN
7242	Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional
72421	Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional
724211	PMP untuk Badan Internasional
	Penyertaan modal pemerintah pada Badan Internasional
7243	Penyertaan Modal Pemerintah Lainnya
72431	Penyertaan Modal Lainnya
724311	Penyertaan Modal Lainnya
	Penyertaan modal pemerintah selain pada BUMN dan Badan Internasional.
724312	Penyertaan Modal Pemerintah SMF
	Penyertaan modal pemerintah pada SMF
7244	Pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN
72441	Pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN
724411	Pengembalian PMP untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
	Merupakan kontra pos dari PMP untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Mata Anggaran 724111)
7245	Pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional
72451	Pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional
724511	Pengembalian PMP untuk Badan Internasional
	Merupakan kontra pos dari PMP untuk Badan Internasional (Mata Anggaran 724211)
7246	Pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah Lainnya
72461	Pengembalian Penyertaan Modal Lainnya
724611	Pengembalian Penyertaan Modal Lainnya
	Merupakan kontra pos dari Penyertaan Modal Lainnya (Mata Anggaran 724311)
724612	Pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah SMF
	Merupakan kontra pos dari Penyertaan Modal Pemerintah SMF (Mata Anggaran 724312)

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

725	RDI/RPD
7251	RDI/RPD
72511	Piutang Pemerintah
725111	Piutang Pemerintah Kepada Daerah
	Investasi pemerintah pusat pada pemerintah daerah.
725112	Piutang Pemerintah Kepada BUMN
	Investasi pemerintah pusat pada BUMN.
725113	Piutang Pemerintah Kepada Swasta
	Investasi pemerintah pusat pada Swasta.
7252	Penerusan Pinjaman Luar Negeri
72521	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan
725211	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan
	Penerusan pinjaman LN kepada Daerah (RPD) tahun anggaran berjalan.
725212	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan
	Penerusan pinjaman LN kepada BUMN (RDI) tahun anggaran berjalan.
72522	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu
725221	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Th. Anggaran Yang Lalu
	Penerusan pinjaman LN kepada daerah (RPD) tahun anggaran yang lalu.
725222	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Yang Lalu
	Penerusan pinjaman LN kepada BUMN (RDI) tahun anggaran yang lalu.
7253	Pengembalian RDI/RPD
72531	Pengembalian Piutang Pemerintah
725311	Pengembalian Piutang Pemerintah Kepada Daerah
	Merupakan kontra pos dari Piutang Pemerintah Kepada Daerah (Mata Anggaran 725111)
725312	Pengembalian Piutang Pemerintah Kepada BUMN
	Merupakan kontra pos dari Piutang Pemerintah Kepada BUMN (Mata Anggaran 725112)
725313	Pengembalian Piutang Pemerintah Kepada Swasta
	Merupakan kontra pos dari Piutang Pemerintah Kepada Swasta (Mata Anggaran 725113)
7254	Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri
72541	Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan
725411	Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan
	Merupakan kontra pos dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan (Mata Anggaran 725211)
725412	Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan
	Merupakan kontra pos dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan (Mata Anggaran 725212)
72542	Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu
725421	Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Th. Anggaran Yang Lalu
	Merupakan kontra pos dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Th. Anggaran Yang Lalu (Mata Anggaran 725221)
725422	Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Yang Lalu
	Merupakan kontra pos dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Yang Lalu (Mata Anggaran 725222)
726	Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain
7261	Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain
72611	Penyesuaian Reksus Karena Selisih Kurs
726111	Penyesuaian Penurunan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

7262	Koreksi Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain
72621	Koreksi Penyesuaian Reksus Karena Selisih Kurs
726211	Koreksi Penyesuaian Penurunan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs
	Merupakan kontra pos dari Penyesuaian Penurunan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs (Mata Anggaran 726111)
8	NON ANGGARAN
81	Penerimaan Non Anggaran
811	Penerimaan Non Anggaran PFK
8111	Penerimaan PFK 10 % Gaji
81111	Penerimaan PFK 10 % Gaji
811111	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji PNS Pusat
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan pihak ketiga atas Gaji PNS Pusat sebesar 10%
811112	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji PNS Daerah
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan pihak ketiga atas Gaji PNS Daerah sebesar 10%
811113	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji Polri dan PNS Polri
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan pihak ketiga atas Gaji Polri dan PNS Polri sebesar 10%
811114	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji TNI dan PNS Dephan
	Penerimaan yang bersumber dari potongan pihak ketiga atas Gaji TNI dan PNS Dephan sebesar 10%
8112	Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan
81121	Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan
811211	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan PNS Pusat
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan pihak ketiga atas Gaji Terusan PNS Pusat sebesar 2%
811212	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji terusan PNS Daerah
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan pihak ketiga atas Gaji Terusan PNS Daerah sebesar 2%
811213	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan POLRI dan PNS Polri
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan pihak ketiga atas Gaji Terusan Polri dan PNS Polri sebesar 2%
811214	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan TNI dan PNS DEPHAN
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan pihak ketiga atas Gaji Terusan TNI dan PNS DEPHAN sebesar 2%
8113	Penerimaan PFK Beras BULOG
81131	Penerimaan PFK Beras BULOG
811311	Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog PNS Pusat
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan atas Gaji PNS Pusat untuk PFK Bulog
811312	Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog Polri & PNS POLRI
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan atas Gaji Polri dan PNS POLRI untuk PFK Bulog
811313	Penerimaan Setoran/ Potongan PFK Bulog TNI & PNS Dephan
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan atas Gaji TNI dan PNS Dephan untuk PFK Bulog
8114	Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda
81141	Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda
811411	Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Propinsi
	Penerimaan setoran yang bersumber dari Iuran Asuransi Kesehatan Pemda Tk. I/Propinsi sebesar 2%
811412	Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Kabupaten/Kota
	Penerimaan setoran yang bersumber dari Iuran Asuransi Kesehatan Pemda Tk. II/Kabupaten/Kota sebesar 2%
8115	Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT
81151	Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT
811511	Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
	Penerimaan setoran yang bersumber dari Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT sebesar 2%
8116	Penerimaan PFK 2 % Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/POLRI
81161	Penerimaan PFK 2 % Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/POLRI
811611	Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan PensiunTNI/PNS Dephan
	Penerimaan setoran yang bersumber dari Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/PNS Dephan sebesar 2%

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

811612	Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun POLRI/PNS POLRI
	Penerimaan setoran yang bersumber dari Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun POLRI/PNS POLRI sebesar 2%
8119	Penerimaan PFK Lain-lain
81191	Penerimaan PFK Lain-lain
811911	Penerimaan Setoran Potongan PFK Lain lain
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan PFK selain setoran/potongan PFK 10 % Gaji, PFK 2 % Gaji Terusan, PFK Beras BULOG, PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda, dan PFK Tabungan Wajib Perumahan.
811912	Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan atas Gaji PNS Pusat untuk PFK Tabungan Wajib Perumahan.
811913	Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Daerah
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan atas Gaji PNS Daerah untuk PFK Tabungan Wajib Perumahan.
812	Penerimaan Wesel Pemerintah
8121	Penerimaan Wesel Pemerintah
81211	Penerimaan Wesel Pemerintah
812111	Penerimaan potongan WP dari SPM KPPN
812112	Penerimaan Setoran untuk penerbitan WP
813	Penerimaan Reimbursement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya KPPN Khusus ?
8131	Penerimaan Reimbursement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya
81311	Penerimaan Reimbursement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya
813111	Penerimaan setoran sisa UP-PP
	Penerimaan setoran sisa Uang Persediaan yang berasal Pembiayaan Pendahuluan.
813112	Penerimaan Reimbursement / Pengganti PFK PP dan PPHLN
	Penerimaan yang berasal dari penggantian PFK Pembiayaan Pendahuluan dan PPHLN
813113	Penerimaan Penggantian UP PP Berasal dari SPM GU Nihil (Pengesahan)
	Penerimaan dalam rangka pengembalian/penggantian Uang Persediaan yang dipakai sebagai Pembiayaan Pendahuluan.
813114	Penerimaan Talangan dari Rekening Dana SAL
813115	Penggantian Dana Rek. KPPN ke Rek BUN atas Pembayaran kepada PPHLN (Karena adanya pembayaran ineligible)
813116	Penggantian Dana dari REKSUS ke Rek BUN karena REKSUS kosong
813117	Penggantian Dana dari REKSUS ke Rekening BUN karena reфинancing REKSUS
813118	Penggantian Dana dari Pihak ketiga ke Rekening BUN atas pembayaran kepada PPHLN (Karena adanya pembayaran ineligible)
813119	Penggantian Dana dari Rekening Dana Talangan REKSUS kosong
81312	Penerimaan dana talangan dari dana moratorium
813121	Penerimaan dana talangan dari dana moratorium
814	Penerimaan Kiriman Uang
8141	Penerimaan Kiriman Uang
81411	Penerimaan Kiriman Uang
814111	Penerimaan Kiriman Uang Antar KPPN

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

	Penerimaan TUK dari Rekening 501.000.000 pada KPPN Induk untuk mengisi pagu BO I Gaji/Non Gaji
814112	Penerimaan Kiriman Uang dari Kantor Pusat DJPb ke KPPN
	Penerimaan Kiriman Uang dari rekening 500.000.000 pada Bank Indonesia Pusat ke Rekening Kas Negara pada KPPN satu kota dengan KBI
814113	Penerimaan Kiriman Uang dari KPPN ke Kantor Pusat DJPb
	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Kas negara pada KPPN satu kota dengan KBI ke Rekening 500.000.000
814114	Penerimaan Kiriman Uang dari Kantor Pusat DJPb 500.000.000 ke Rekening BUN
814115	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening BUN ke Kantor Pusat DJPb 500.000.000
814116	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Sub BUN Valas ke Rekening BUN
814117	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening 501 ke Bank Operasional I
814118	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening 501 ke Bank Operasional II
81412	Penerimaan Kiriman Uang dalam rangka TSA
814121	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening 501.000.000 KPPN Induk ke Bank Operasional I KPPN Non KBI dan sebaliknya
814122	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening 501.000.000 KPPN Induk ke Bank Operasional II KPPN Non KBI dan sebaliknya
814123	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening 501.000.000 KPPN Induk ke Sentral Giro/SGG KPPN Non KBI dan sebaliknya
814124	Penerimaan Kiriman Uang dari Bank Operasional III KPPN Non KBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
814125	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Gabungan KPPN Non KBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
814126	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening BUN ke RPK-BUN-P
814127	Penerimaan Kiriman Uang dari RPK-BUN-P ke BO I di KPPN
814128	Penerimaan Kiriman Uang dari RPK-BUN-P ke Rekening BUN
814129	Penerimaan Kiriman Uang dari BO I di KPPN ke RPK-BUN-P
8142	Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus
81421	Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus
814211	Penerimaan Kiriman Uang dari Reksus ke KPPN (berdasarkan SPM-LS /SPM-GU Isi/SPM Pengganti)
814212	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening DJPb 500.000.000
814213	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening BUN
814214	Pembetulan Pembukuan Pengeluaran Penggantian dari Rekening Khusus

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

814215	Penerimaan dari KPPN ke Rekening DJPb 500.000.00 berdasarkan SPM Pengganti
814216	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Khusus
8143	Penerimaan Pemindahbukuan
81431	Penerimaan Pemindahbukuan
814311	Penerimaan Pemindahbukuan Intern KPPN
814312	Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional / dan sebaliknya
	Penerimaan dari pemindahbukuan dari rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia ke Rekening Gaji pada BO I sesuai pagu
	Penerimaan dari pemindahbukuan dari rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia ke Rekening Non Gaji pada BO I sesuai pagu
	Penerimaan pemindahbukuan dari BO I ke Rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia
814313	Pemindahbukuan dari Bank Operasional (BO) I ke BO II dan sebaliknya
	Penerimaan Pemindahbukuan ini terdiri dari :
	Penerimaan kelebihan pagu pada BO II dimana pagu pada BO II ditetapkan paling banyak sebesar 5% dari pembayaran gaji
	Penerimaan yang berasal dari pemindahbukuan dari BO I gaji untuk pembayaran gaji bulan berkenaan, penerimaan tambahan pagu dari BO I Gaji untuk pembayaran belanja pegawai non gaji induk apabila pagu di BO I Gaji masih ada atau sebelum penihilan BO I Gaji, atau dari BO I Non Gaji apabila pagu di BO I gaji telah nihil
814314	Pemindahbukuan dari Rekening Gabungan ke Bank Tunggal (Bank Operasional)
	Penerimaan pelimpahan dari Rekening Gabungan Bank/Kantor Pos Persepsi ke BO I Non Gaji .
814315	Pemindahbukuan dari Bank Tunggal/Operasional I ke Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan dan sebaliknya
	Penerimaan pelimpahan dari rekening Pos Persepsi setiap hari Selasa, Rabu dan Jum'at
	Pemindahbukuan dari BO I Gaji/Non Gaji ke SG/SGG Pengeluaran untuk pembayaran belanja.gaji pegawai dan non gaji
814316	Pemindahbukuan dari Bank Operasional III ke Bank Tunggal/Bank Operasional I
	Penerimaan dari pelimpahan PBB dan BPHTB sebesar % (persentase) bagian pemerintah pusat dan biaya pemungutan PBB
814317	Penerimaan Pemindahbukuan dari Bank Persepsi PBB ke BO III
	Penerimaan pemindahbukuan PBB dari Bank Persepsi PBB setiap hari Jum'at dengan MAP 411311,411312, 411313,411314,411315,dan 411319
814318	Penerimaan Pemindahbukuan dari Bank Persepsi BPHTB ke BO III
	Penerimaan pemindahbukuan BPHTB dari Bank Persepsi BPHTB setiap hari Jum'at dengan MAP 411411
81432	Penerimaan Pemindahbukuan dalam rangka TSA
814321	Penerimaan Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional I dan sebaliknya
	Penerimaan pemindahbukuan dari rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia ke Rekening Gaji pada BO I sesuai pagu dalam rangka TSA
	Penerimaan pemindahbukuan dari rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia ke Rekening Non Gaji pada BO I sesuai pagu dalam rangka TSA
	Penerimaan pemindahbukuan dari BO I ke Rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia dalam rangka TSA
814322	Penerimaan Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional II dan sebaliknya
	Penerimaan pemindahbukuan dari rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia ke Rekening BO II sesuai pagu dalam rangka TSA
	Penerimaan pemindahbukuan dari BO II ke Rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia dalam rangka TSA
815	Penerimaan Transito
8151	Penerimaan Transito
81511	Penerimaan Transito
815111	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

815112	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri
815113	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)
815114	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu
82	PENGELUARAN NON ANGGARAN
821	PENGELUARAN NON ANGGARAN PFK
8211	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji
82111	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji
821111	Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun PNS (4,75%)
	Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji PNS sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Pensiun PNS pada PT. TASPEN (Persero).
821112	Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua PNS (3,25%)
	Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji PNS sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua PNS ke PT. TASPEN (Persero).
821113	Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%)
	Penyaluran dana setoran/potongan luran Asuransi Kesehatan Gaji PNS sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).
821114	Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Polri & PNS Polri (4,75%)
	Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polri dan PNS Polri sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Pensiun Polri dan PNS Polri pada PT. TASPEN (Persero).
821115	Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua Polri & PNS Polri (3,25%)
	Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polri dan PNS Polri sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polri dan PNS Polri ke PT. TASPEN (Persero).
821116	Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Polri & PNS Polri (2%)
	Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Polri & PNS Polri sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).
821117	Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Personel TNI dan PNS Dephan (4,75%)
	Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Pensiun Polri dan PNS Polri pada PT. TASPEN (Persero).
821118	Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Dephan (3,25%)
	Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polri dan PNS Polri ke PT. TASPEN (Persero).
821119	Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%)
	Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI dan PNS Dephan sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).
8212	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan
82121	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan
821211	Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Gaji Terusan
	Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Pusat sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).
821212	Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%)
	Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Daerah sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).
821213	Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Polri & PNS Polri (2%)
	Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan Polri & PNS Polri sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).
821214	Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%)

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

	Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan TNI & PNS Dephan sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).
8213	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog
82131	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog
821311	Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog PNS Pusat
	Penyaluran penyetoran setoran/potongan PFK Beras PNS Pusat ke PT. BULOG
821312	Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog Polri & PNS Polri
	Penyaluran penyetoran setoran/potongan PFK Beras Polri & PNS Polri ke PT. BULOG
821313	Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog TNI & PNS Dephan
	Penyaluran penyetoran setoran/potongan PFK Beras TNI & PNS Dephan ke PT. BULOG
8214	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda
82141	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda
821411	Pengembalian Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Propinsi
	Pengeluaran penyetoran setoran/potongan PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan PNS Pemda Tk.I/Propinsi ke PT ASKES (Persero).
821412	Pengembalian Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Kabupaten/Kota
	Pengeluaran penyetoran setoran/potongan PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan PNS Pemda Tk.II/Kabupaten/Kota ke PT ASKES (Persero).
8215	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT
82151	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT
821511	Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
	Pengeluaran penyetoran setoran/potongan PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT ke PT ASKES (Persero).
8216	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/POLRI
82161	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/POLRI
821611	Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/PNS Dephan
	Pengeluaran penyetoran setoran/potongan PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/PNS Dephan ke PT ASKES (Persero).
821612	Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun POLRI/PNS POLRI
	Pengeluaran penyetoran setoran/potongan PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun POLRI/PNS POLRI ke PT ASKES (Persero).
8219	Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain
82191	Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain
821911	Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain
	Pengeluaran penyetoran setoran/potongan PFK selain setoran/potongan PFK 10 % Gaji, PFK 2 % Gaji Terusan,
	PFK Beras BULOG, PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda, dan PFK Tabungan Wajib Perumahan kepada pihak-pihak terkait.
821912	Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Perumahan PNS Pusat
	Pengeluaran penyetoran setoran/potongan PFK Tabungan Perumahan PNS Pusat ke BAPETARUM.
821913	Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Perumahan PNS Daerah
	Pengeluaran penyetoran setoran/potongan PFK Tabungan Perumahan PNS Daerah ke BAPETARUM.
822	Pelunasan Wesel Pemerintah
8221	Pelunasan Wesel Pemerintah
82211	Pelunasan Wesel Pemerintah
822111	Pelunasan Wesel Pemerintah
	Pengeluaran untuk pembayaran wesel pemerintah
823	Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya è KPPN Khusus
8231	Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya
82311	Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya
823111	Pembayaran UP-PP (DU/TU)
823112	Pembayaran PFK PP (Prefinancing)

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

823113	Pembayaran SPM-GU Nihil (Pengesahan ke Rekening BUN)
823114	Pengembalian Talangan Dana SAL
823115	Pembayaran kepada PPHLN karena pengeluaran in-eligible
823116	Pembayaran dari Rekening BUN karena Reksus kosong
823117	Pembayaran dari Rekening BUN karena Prefinancing UP-Reksus
823118	Pengisian Rekening Dana SAL
823119	Pembayaran ke Rekening Dana Talangan Reksus kosong
82312	Pengembalian dana talangan ke dana moratorium
823121	Pengembalian dana talangan ke dana moratorium
824	Pengeluaran Kiriman Uang
8241	Pengeluaran Kiriman Uang
82411	Pengeluaran Kiriman Uang
824111	Pengeluaran Kiriman Uang antar KPPN
	Pengeluaran Kiriman Uang antar KPPN terjadi karena penihilan pagu BO I Gaji dan pengiriman kelebihan pagu dari BO I Non Gaji ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
824112	Pengeluaran Kiriman Uang dari KPPN ke Kantor Pusat DJPb
	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Kas negara pada KPPN satu kota dengan KBI ke Rekening 500.000.000
824113	Pengeluaran Kiriman Uang dari Kantor Pusat DJPb ke KPPN
	Pengeluaran Kiriman Uang dari rekening 500.000.000 pada Bank Indonesia Pusat ke Rekening Kas Negara pada KPPN satu kota dengan KBI
824114	Pengeluaran Kiriman Uang dari Kantor Pusat DJPb ke Rekening BUN
824115	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening BUN ke Kantor Pusat DJPb
824116	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening BUN ke Rekening Sub BUN Valas
824117	Pengeluaran Kiriman Uang dari Bank Operasional I ke Rekening 501
824118	Pengeluaran Kiriman Uang dari Bank Operasional II ke Rekening 501
82412	Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka TSA
824121	Pengeluaran Kiriman Uang dari Bank Operasional I KPPN Non KBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk dan sebaliknya
824122	Pengeluaran Kiriman Uang dari Bank Operasional II KPPN Non KBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk dan sebaliknya
824123	Pengeluaran Kiriman Uang dari Sentral Giro/SGG KPPN Non KBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk dan sebaliknya

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

824124	Pengeluaran Kiriman Uang dari Bank Operasional III KPPN Non KBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
824125	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Gabungan KPPN Non KBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
824126	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening BUN ke RPK-BUN-P
824127	Pengeluaran Kiriman Uang dari RPK-BUN-P ke BO I KPPN
824128	Pengeluaran Kiriman Uang dari RPK-BUN-P ke Rekening BUN
824129	Pengeluaran Kiriman Uang dari BO I KPPN ke RPK-BUN-P
8242	Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus
82421	Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus
824211	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke KPPN
824212	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening DJPb 500.000.000
824213	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening BUN
824214	Pembetulan Pembukuan Penerimaan Penggantian dari Rekening Khusus
824215	Pengeluaran dari KPPN ke Rekening DJPb 500.000.000 berdasarkan SPM Pengganti
824216	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Khusus
8243	Pengeluaran Pemindahbukuan
82431	Pengeluaran Pemindahbukuan
824311	Pengeluaran Pemindahbukuan Intern KPPN
824312	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional / dan sebaliknya
	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Kas Negara No. 501.000.000 pada Bank Indonesia ke BO untuk pembayaran belanja gaji dan non gaji
	Pengeluaran Pemindahbukuan kelebihan saldo pada rekening non gaji atau sisa pagu pada rekening Gaji BO II ke Rekening Kas Negara No. 501.000.000 pada Bank Indonesia
824313	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Operasional (BO) I ke BO II dan sebaliknya
	Pengeluaran untuk pemindahbukuan dari BO II ke BO I terdiri dari :
	Pembagian pagu belanja pegawai dari BO I sebesar pembayaran gaji ditambah 5% dari pembayaran gaji ke masing-masing BO II, penambahan pagu BO II untuk kekurangan pembayaran belanja pegawai di luar gaji induk
	Pengeluaran untuk pemindahbukuan dari BO II ke BO I meliputi pengeluaran pemindahbukuan kelebihan pagu BO II ke BO I Gaji sebelum penihilan BO I Gaji atau ke BO I Non Gaji setelah penihilan BO I Gaji
824314	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Gabungan ke Bank Tunggal (Bank Operasional)
	Pengeluaran dalam rangka pelimpahan dari Rekening Gabungan Bank/Kantor Pos Persepsi ke BO I Non Gaji. Rekening Kas Negara Gabungan adalah satu rekening untuk menampung pelimpahan penerimaan dari Rekening Kas Negara Persepsi
824315	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Tunggal/Operasional I ke Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan dan sebaliknya
	Pemindahbukuan dari BO I Gaji/Non Gaji ke SG/SGG Pengeluaran untuk pembayaran belanja.gaji pegawai dan non gaji

DAFTAR PENJELASAN MAP/MAK

	Pemindahbukuan dalam rangka pelimpahan penerimaan negara dari rekening Pos Persepsi ke BO I
824316	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Operasional III ke Bank Tunggal/Bank Operasional I
	Pelimpahan PBB dan BPHTB sebesar % (persentase) bagian pemerintah pusat dan biaya pemungutan PBB
824317	Pegeluaran Pemindahbukuan dari Bank Persepsi PBB ke BO III
	Pengeluaran pemindahbukuan PBB dari Bank Persepsi PBB setiap hari Jum'at dengan MAP 411311,411312, 411313,411314,411315,411319
824318	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Persepsi BPHTB ke BO III
	Pengeluaran pemindahbukuan BPHTB dari Bank Persepsi BPHTB setiap hari Jum'at dengan MAP 411411
82432	Pengeluaran Pemindahbukuan dalam rangka TSA
824321	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional I dan sebaliknya
	Pengeluaran pemindahbukuan dari rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia ke Rekening Gaji pada BO I sesuai pagu dalam rangka TSA
	Pengeluaran pemindahbukuan dari rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia ke Rekening Non Gaji pada BO I sesuai pagu dalam rangka TSA
	Pengeluaran pemindahbukuan dari BO I ke Rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia dalam rangka TSA
824322	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional II dan sebaliknya
	Pengeluaran pemindahbukuan dari rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia ke Rekening BO II sesuai pagu dalam rangka TSA
	Pengeluaran pemindahbukuan dari BO II ke Rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia dalam rangka TSA
825	Pengeluaran Transito
8251	Pengeluaran Transito
82511	Pengeluaran Transito
825111	Pengeluaran Uang Persediaan Dana Rupiah
825112	Pengeluaran Uang Persediaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri
825113	Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)